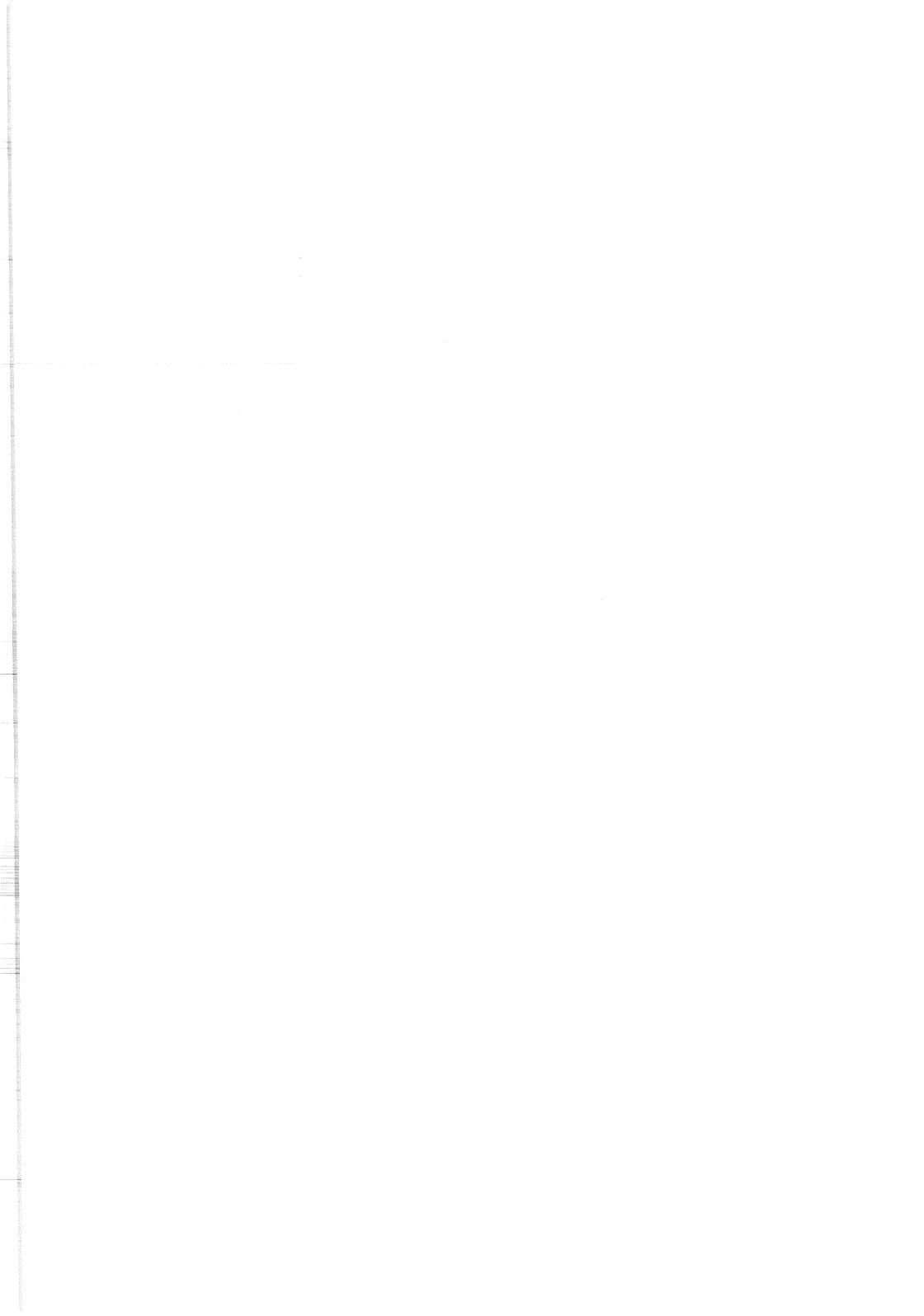


Strategi Nelayan
dalam **Peningkatan**
Kesejahteraan:

Alternatif, Kendala dan
Dukungan Kebijakan



Strategi Nelayan
dalam **Peningkatan**
Kesejahteraan:

Alternatif, Kendala dan
Dukungan Kebijakan

Oleh :
Masyhuri Imron
M. Azzam Manan

Editor :
Masyhuri Imron



Program Insentif Riset Peneliti dan Perekayasa
2009



©2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan:
Alternatif, Kendala dan Dukungan Kebijakan/Masyhuri Imron,
M. Azzam Manan, Jakarta: LIPI Press, 2009

vii + 94 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-979-799-485-3

1. Nelayan
2. Kesejahteraan

338. 372

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Nelayan identik dengan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengejntaskan mereka dari kemiskinan, namun sampai saat ini belum membawa hasil yang memuaskan. Terkait dengan itu maka perlu upaya terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Buku “Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan: Alternatif, Kendala dan Dukungan Kebijakan” ini merupakan salah satu dari hasil kegiatan penelitian yang termasuk dalam Program Insentif Riset Peneliti dan Perakayasa – LIPI. Penelitian yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI ini merupakan upaya mencari mencari strategi alternatif upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga sampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan kehadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat diupungkiri bahwa beberapa kekurangan

mungkin masih terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Ruang Lingkup	11
1.6 Metodologi	11
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	15
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati.....	15
2.2 Kecamatan Juwana dan Desa Bendar	23
BAB III STRATEGI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN	33
3.1 Sejarah Ringkas Kenelayanan Desa Bendar.....	33
3.2 Intensifikasi Peralatan Tangkap	34
3.3 Pendirian Koperasi Nelayan	41
3.4 Ekstensifikasi Peralatan Tangkap: Penggunaan <i>Cantrang</i>	43
3.5 Sistem Pengelolaan Usaha Perikanan Berbasis Saham (<i>Profit-Sharing</i>)	48
3.6 Etos Kerja Produktif.....	50
3.7 Diversifikasi Usaha Perikanan	52
3.8 Kendala yang Dihadapi	57

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN	63
4.1 Penyuluhan Masyarakat.....	63
4.2 Bantuan Peralatan Tangkap.....	69
4.3 Kebijakan Perijinan	72
4.4 Pembangunan TPI	76
4.5 Kebijakan Lain	78
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati.....	16
Tabel 2.2	Penduduk Kabupaten Pati yang Bekerja di Sektor Perikanan (2008).....	17
Tabel 2.3	Potensi Maksimum Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Laut Jawa (Tahun 2008)	18
Tabel 2.4	Potensi Maksimum Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Perairan Pantai Kabupaten Pati Tahun 2002	19
Tabel 2.5	Volume dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Pati Tahun 2007 dan 2008	20
Tabel 2.6	Produksi Ikan Laut di Kabupaten Pati Tahun 2008 ...	21
Tabel 2.7	Luas, Produksi dan Nilai Perikanan Tambak Kabupaten Pati (Tahun 2008)	22
Tabel 2.8	Produksi Pengolahan Ikan di Kabupaten Pati Tahun 2008	23
Tabel 2.9	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Juwana	24
Tabel 2.10	Produksi dan Nilai Ikan Basah Hasil Pelelangan Ikan Laut Segar di TPI Bajomulyo I dan Bajomulyo II Menurut Bulan (2007)	25
Tabel 2.11	Luas Produksi dan Nilai Produksi Ikan di Kecamatan Juwana (2007)	26
Tabel 2.12	Penduduk Desa Bendar Menurut Kelompok Usia Tahun 2007	29
Tabel 2.13	Penduduk Menurut Usia	30
Tabel 2.14	Matapencaharian Penduduk Desa Bendar, Juwana	31

Tabel 3.1	Sistem Bagi Hasil Pendapatan Kapal <i>Cantrang</i>	45
Tabel 3.2	Pendapatan Kapal <i>Cantrang</i> dalam Setiap Operasi Menangkap Ikan (Rp'000)	47
Tabel 4.1	Beberapa Program Pemberdayaan Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	66
Tabel 4.2	Bantuan Peralatan Perikanan Kepada Nelayan Melalui Paguyuban Amanat	70
Tabel 4.3	Pembagian Jalur Wilayah Penangkapan Perikanan Laut	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Produksi Perikanan Laut Kecamatan Juwana dengan Kecamatan Lain	21
Gambar 2.2 Pemanfaatan Lahan Desa Bendar	27
Gambar 2.3 Penduduk Desa Bendar Menurut Jenis Kelamin	28
Gambar 2.4 Penduduk Desa Bendar Usia Produktif dan Bukan Produktif	29
Gambar 2.5 Perbandingan Komposisi Matapencapaian Penduduk Desa Bendar	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan bukanlah suatu gejala baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga istilah ini menjadi suatu yang tidak asing lagi. Sebagaimana dikemukakan oleh Masyhuri (1999:4), gambaran tentang kemiskinan itu sudah ada pada sastra Jawa kuno “*Serat Kakawin*”, sebagaimana yang dibahas oleh Zoetmulder dalam *Kalangwang*. Dalam bahasan tersebut Zoetmulder menunjukkan bahwa kemiskinan itu sudah lama menghinggapinya penduduk Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Pada saat ini, walaupun sudah hidup dalam kemerdekaan selama puluhan tahun, namun dalam statusnya sebagai negara yang sedang berkembang, kondisi kemiskinan itu juga selalu tampak dan hadir di tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa. Dalam hal ini istilah kemiskinan itu lebih diartikan sebagai suatu kondisi yang serba kekurangan, yang merupakan suatu definisi umum yang digunakan untuk menjelaskan tentang kemiskinan.

Sartono Kartodirdjo, sebagaimana dikutip oleh Hari Poerwanto (2000:197), mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat desa di Indonesia diliputi oleh sindrom kemiskinan dan *sindrom enersia*. Sindrom kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat miskin. Kondisi ini memiliki dimensi yang sangat kompleks, dan satu dengan lainnya saling berkaitan. Ini dapat dilihat antara lain dalam bentuk tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran, kurang gizi, tingkat kesehatan yang buruk, serta tingkat *morbiditas* dan buta huruf yang tinggi. Adapun *sindrom enersia* adalah sikap hidup yang mewarnai kehidupan orang miskin, yang antara lain terwujud pada sikap fatalis, pasif, rasa ketergantungan yang tinggi, dan kehidupan yang diwarnai oleh suasana mistik.

Jika sebagian besar masyarakat desa di Indonesia diliputi oleh kedua sindrom tersebut, maka masyarakat nelayan, sebagai suatu bagian dari masyarakat pesisir, tentunya tidak terlepas dari sindrom itu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto, 1984; Imron, 2001; Masyhuri, 1999). Kondisi kemiskinan nelayan itu juga dikemukakan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap, yang mengatakan bahwa 90% dari jumlah nelayan di Cilacap yang mencapai 36.000 orang, hidup dalam kemiskinan. Dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, dari 16,42 juta warga yang bermatapencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar, dan pedagang hasil perikanan yang menghuni 8.090 desa pesisir di Indonesia (yang termasuk dalam 300 kabupaten dan kota berpesisir), 32 persen di antaranya juga termasuk kategori miskin (www.suarapembaruan.com/last/index.html).

Indikasi kemiskinan nelayan itu dengan mudah dapat dilihat pada saat memasuki desa nelayan. Kondisi perumahan yang kumuh adalah sebuah citra umum yang selalu dikaitkan dengan kehidupan nelayan. Selain itu, perabotan yang seadanya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah, merupakan gambaran yang tidak terlepas dari kehidupan nelayan pada umumnya. Begitu pula kondisi pendidikan yang juga rendah. Walaupun gambaran seperti itu tidak seluruhnya benar, namun itulah kenyataan umum yang terlihat pada saat ini.

Gambaran seperti itu didukung oleh hasil penelitian tahu 2001 yang menunjukkan pengakuan seorang buruh nelayan *slerek*¹ di Muncar, Jawa Timur, yang rata-rata pendapatan per bulannya hanya sekitar Rp250.000,- - Rp400.000,- (Imron, 2002:59). Bahkan beberapa nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu. Memang pada

¹ Slerek adalah alat tangkap jenis *purse seine* yang digunakan oleh nelayan Muncar, dan pengoperasiannya menggunakan dua perahu ukuran antara 20 – 30 GT.

saat musim ikan pendapatan nelayan cukup tinggi, karena banyak ikan yang dapat ditangkap. Namun keadaan seperti itu biasanya tidak berlangsung lama, hanya satu atau dua bulan dalam setahunnya. Selebihnya, pendapatan nelayan cenderung tidak menentu. Bahkan pada saat musim paceklik, tidak jarang nelayan justru pulang dari laut dengan tangan hampa karena tidak ada ikan yang berhasil ditangkap. Apalagi jika musim ombak, tidak jarang nelayan justru tidak dapat melaut. Karena itu jika dibuat angka rata-rata per bulan dalam setahunnya, pendapatan nelayan cenderung kecil.

Kecilnya pendapatan nelayan juga didukung oleh fluktuasi harga ikan yang cenderung sangat tajam, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil. Jika sedang tidak musim ikan harga ikan memang cenderung tinggi, namun pada saat banyak ikan maka harga ikan cenderung rendah. Akibatnya berapa pun banyaknya hasil tangkapan pada saat musim ikan, hal itu tidak banyak membawa pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Hal yang sama terjadi juga pada nelayan di tempat-tempat yang lain. Walaupun di tempat-tempat itu harga ikan cenderung stabil, namun stabilitas harga ikan bukan pada level atas, melainkan pada level bawah. Akibatnya walaupun sedang tidak musim ikan, harga ikan juga cenderung tetap rendah. Hal ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesejahteraan nelayan.

Untuk mengatasi kondisi seperti itu, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu yang datangnya dari nelayan itu sendiri dalam bentuk penyesuaian dan/atau perlawanan terhadap perkembangan lingkungan sosial maupun fisik, dan yang datangnya dari pihak di luar komunitas nelayan, yaitu berupa kebijakan pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi nelayan atau kepedulian dari pihak-pihak lainnya.

Bentuk penyelesaian yang paling umum dilakukan oleh nelayan adalah diversifikasi usaha di luar kenelayanan, seperti bertani atau berkebun, bahkan menjadi buruh tani. Beberapa komunitas nelayan yang lain, seperti di wilayah Pantura Pulau Jawa, lebih

banyak memilih menjadi tukang becak atau yang masih berkaitan dengan kenelayanan, menjadi buruh nelayan di pantai atau menjadi ABK pada usaha penangkapan ikan. Dalam bentuk yang negatif, nelayan melakukan penyesuaian alat tangkap dengan menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan dan potasium.

Di sisi lain, banyak nelayan yang belum banyak menikmati atau tidak merasakan layanan pemerintah yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh aksesibilitas yang sulit dan jauh dari pusat pemerintahan. Di samping itu, perencana pembangunan juga sering bias dalam memandang masyarakat nelayan. Perspektif yang digunakan dalam pembangunan masih menggunakan paradigma daratan, sehingga nelayan diperlakukan sama dengan petani – yang akhirnya sektor kelautan tidak dipandang sebagai prioritas. Padahal jika ditinjau dari perspektif historis, geografis, sosial, budaya dan politik, pembangunan kelautan semestinya menjadi *mainstream* pembangunan nasional. Paradigma yang keliru inilah yang menjadi kelemahan proses pembangunan kelautan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan sampai pada pengendalian (csr-pesisir.blogspot.com/).

Program-program yang selama ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, seperti Co-Fish (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*) atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan., MCMRP (*Marine and Coastal Resources Management Project*), PLBPM (Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat), PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PMB (Program Mitra Bahari) dan Kedai Pesisir sering kurang memperhatikan kondisi lokal sasaran program atau tidak memperhatikan keunikan pola hubungan kerja yang dibentuk atas dasar jalinan kekerabatan. Pengabaian terhadap faktor tersebut sering menimbulkan bukan saja berpengaruh terhadap keberhasilan program, melainkan kadang justru mengakibatkan terjadinya konflik dalam komunitas nelayan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, mengingat permasalahan yang dihadapi oleh nelayan itu sangat spesifik, berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain, maka pendekatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka tentunya juga harus bersifat khusus. Dalam konteks itulah maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

1.2 Permasalahan

Pada saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat, agar tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Sementara itu, masyarakat sendiri sebetulnya tidak tinggal diam. Mereka selalu berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari jerat kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka.

Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan. Jika pada masyarakat petani terdapat berbagai program subsidi, seperti subsidi pupuk dan benih, maka pada masyarakat nelayan subsidi seperti itu hampir tidak pernah mereka peroleh. Memang di beberapa daerah kadang ada semacam bantuan peralatan tangkap untuk nelayan, namun sering peralatan bantuan itu tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Beberapa bantuan dana yang digulirkan ke nelayan juga sering tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan, karena kendala yang sifatnya struktural seperti keharusan adanya agunan yang tidak mereka miliki, serta sistem angsuran yang tidak sesuai dengan pola pendapatan mereka. Akibatnya, walaupun beberapa program sudah dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun tetap saja kehidupan nelayan masih akrab dengan kemiskinan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka pertanyaan yang muncul adalah: Strategi seperti apa yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan?

Berkaitan dengan pertanyaan itu maka pertanyaan lain yang perlu segera dicari jawabannya adalah: Strategi seperti apa yang sudah dilakukan oleh para nelayan itu sendiri untuk mengatasi kemiskinannya, dan kendala-kendala apa yang mereka hadapi? Apakah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sudah mendukung kebutuhan nelayan dan mendukung strategi yang dilakukan oleh para nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mencari strategi alternatif upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Adapun tujuan khusus meliputi:

- (a) Mengetahui upaya yang dilakukan nelayan untuk mengatasi kemiskinannya
- (b) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan dalam upaya keluar dari kemiskinan
- (c) Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan

Adapun sasaran penelitian adalah rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan

1.4 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang cair, dan bersifat *multi dimensional*. Disebut cair, karena kemiskinan bisa bermakna subyektif, bermakna relatif, tetapi sekaligus juga bermakna absolut. Sedangkan disebut multidimensional, selain kemiskinan itu dapat dilihat dari sisi ekonomi, juga dari segi sosial, budaya dan politik (Heru Nugroho, 1995: 31).

Pada umumnya konsep kemiskinan lebih banyak dikaitkan dengan dimensi ekonomi. Meskipun demikian, kemiskinan juga terkait dengan dimensi sosial budaya dan sosial politik. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dalam bentuk ketidak-

mampuan suatu keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan, yang secara kualitatif hal itu dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh, perabotan rumahtangga yang seadanya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah, dan kondisi pendidikan yang juga rendah.

Dalam kaitannya dengan dimensi sosial budaya, kemiskinan lebih sulit untuk diukur, dan tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Meskipun demikian, dimensi sosial budaya dari kemiskinan itu dapat dilihat dan dirasakan, karena muncul dalam bentuk budaya kemiskinan. Lewis (Djameludin Ancok, 1995:165) misalnya, menyatakan adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis. Semua itu merupakan budaya yang muncul karena kemiskinan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya, dan diwariskan secara terus-menerus kepada generasi berikutnya, karena digunakan sebagai desain kehidupan bagi orang miskin untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Budaya kemiskinan yang demikian itu sekaligus menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan yang lebih dalam, karena menghambat mereka untuk berjuang dalam melawan kemiskinan yang dialami.

Adapun dalam dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirnya kelompok miskin dalam struktur sosial yang di bawah, dan tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu muncul dengan termarginalisasinya kelompok miskin, sehingga tidak mempunyai akses, misalnya, terhadap lembaga keuangan. Begitu pula dalam program-program untuk perbaikan kelompok ini, mereka tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh orang luar yang merasa tahu atas permasalahan mereka; walaupun secara riil masyarakat miskin itulah yang sebetulnya merasakan dan tahu persis permasalahan yang dihadapi.

Chambers, sebagaimana yang dikutip oleh Loekman Soetrisno (Loekman, 1995:19), menyebutkan bahwa inti dari kemiskinan adalah jebakan kekurangan (*deprivation trap*). Jebakan kekurangan itu terdiri dari lima aspek yang saling terkait, yaitu: (1) Kemiskinan itu sendiri, (2) Kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak-berdayaan. Disebut saling terkait karena kondisi yang ada dalam satu aspek akan mempengaruhi pada aspek-aspek yang lain. Dari lima aspek tersebut, menurut Chambers ada dua hal utama yang sering mengakibatkan orang miskin menjadi lebih miskin, yaitu kerentanan dan ketidak-berdayaan. Dengan kerentanan dan ketidakberdayaan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat.

Menurut Goulet (1973), pemecahan masalah kemiskinan mestinya lebih luas daripada sekedar masalah ekonomi, karena pengentasan kemiskinan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi tiga kebutuhan, yaitu: penopang hidup (*life sustenance*), harga diri (*self esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Todaro (1983), dengan menyebutnya sebagai nilai-nilai hakiki dalam pembangunan, yaitu kebutuhan untuk hidup, harga diri sebagai manusia dan kebebasan.

Berkaitan dengan itu, maka upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, melainkan juga dengan hal-hal lain yang bersifat non ekonomi. Dalam hal ini Collins menyebut beberapa hal yang diperlukan dalam pembangunan non ekonomi, khususnya sosial budaya, yaitu mulai dari pemberian pelayanan sosial sampai pada aspek-aspek yang lebih mendasar, seperti memperkuat struktur sosial dan ikatan keluarga, serta mengembangkan sikap percaya diri sendiri (Moeljarto, 1986:112).

Dalam konteks kenelayanan, upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai programnya, antara lain motorisasi perahu nelayan untuk peningkatan penangkapan, sistem rantai dingin untuk menghindari kemunduran mutu ikan,

pembangunan prasarana perikanan, peningkatan ekspor perikanan untuk memperluas pasar hasil tangkapan, rehabilitasi lingkungan untuk regenerasi sumberdaya perikanan (seperti pembuatan terumbu karang buatan), pengembangan kelembagaan (seperti koperasi perikanan, KUD Mina dan pembentukan kelompok nelayan), dan beberapa program lainnya yang di dalamnya terdapat unsur pemberdayaan, seperti Co-Fish (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*) dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Akan tetapi, semua program tersebut nampaknya belum membawa hasil yang memuaskan, yang terbukti pada masih dominannya nelayan yang termasuk dalam kategori miskin.

Salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah karena penerapan program yang disusun tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, dan masyarakat kurang dilibatkan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhannya. Akibatnya ada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menolaknya, dan ada program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi karena penerapannya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka program itu tidak dapat diakses oleh masyarakat. Program PEMP misalnya, yang memberikan kredit untuk nelayan, sulit bisa diterima oleh nelayan, karena selain dibutuhkan agunan yang biasanya tidak dimiliki oleh nelayan, juga pengembaliannya tidak mengikuti pola pendapatan nelayan.

Pengentasan kemiskinan akan membawa hasil yang memuaskan apabila didasarkan pada kebutuhan nelayan, dan tugas pemerintah adalah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan itu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka analisis kebutuhan perlu dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan. Analisis kebutuhan itu penting, karena nelayan itu sendiri pada dasarnya tidak hanya bersifat pasif menunggu uluran tangan pemerintah, melainkan mereka juga secara aktif mencari alternatif-alternatif untuk bisa keluar dari kemiskinan.

McCay (1978) menunjukkan bahwa ada tiga alternatif yang ditempuh nelayan untuk meningkatkan ekonominya, yaitu: intensifikasi, diversifikasi teknologi dan diversifikasi usaha. Intensifikasi adalah upaya nelayan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan dengan cara meningkatkan kualitas teknologi penangkapan yang digunakan. Diversifikasi teknologi adalah perluasan pilihan alat tangkap yang digunakan, sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap sumberdaya perikanan yang lebih bervariasi, dan mengurangi ketergantungan terhadap musim. Adapun diversifikasi usaha merupakan upaya lain yang dilakukan nelayan, yaitu dengan mencari pendapatan lain dari luar sektor kelautan. Selain tiga hal tersebut, nelayan juga melakukan upaya kelembagaan, baik dalam bentuk kelompok nelayan maupun mengembangkan jaringan sosial lainnya untuk meningkatkan kemampuan ekonominya.

Jika itu yang dibutuhkan nelayan, maka cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi agar nelayan bisa melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi teknologi, membuka alternatif usaha di luar sektor kelautan, dan memberikan bimbingan kelembagaan. Walaupun selama ini hal itu dilakukan oleh pemerintah, namun masalahnya adalah bagaimana agar penerapannya sesuai dengan kondisi sosial yang ada di suatu komunitas nelayan. Praktik pinjaman kredit permodalan yang mengharuskan agunan, atau yang pengembaliannya bersifat bulanan, jelas tidak sesuai dengan kondisi nelayan, yang bisa dipastikan akan mengalami kesulitan jika harus menyediakan agunan, dan seandainya bisa, juga akan mengalami kesulitan untuk mengangsur karena pendapatan nelayan yang fluktuatif dan ketergantungan musim yang sangat tinggi.

Begitu pula pembentukan kelembagaan kelautan yang dilakukan oleh pemerintah juga sering mengabaikan kebutuhan nelayan. Pembentukan koperasi nelayan misalnya, sering dilaksanakan tanpa melalui sosialisasi yang baik, bahkan tidak jarang ketua koperasi justru ditunjuk dari atas, yang belum tentu bisa diterima oleh para nelayan.

Dalam upaya pengentasan nelayan dari kemiskinan, pendekatan seperti itu perlu ditinjau kembali. Untuk itu maka dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan semua aspek yang terkait dengan kebutuhan nelayan perlu mendapatkan perhatian, mulai dari aspek permodalan untuk investasi, penyediaan prasarana kebutuhan pokok, penataan hubungan antar struktur sosial yang ada, sampai pada pembentukan/penguatan kelembagaan sosial. Semua itu dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan yang bukan hanya bermakna ekonomi melainkan juga yang bersifat non ekonomi. Atau seperti yang dikemukakan Goulet, yaitu agar manusia lebih manusiawi (*in order to be more human*) (Goulet, 1973:124).

1.5 Ruang Lingkup

Beberapa aspek yang dilihat dalam penelitian ini meliputi:

- (a) Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk keluar dari kemiskinan
- (b) Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dalam upaya keluar dari kemiskinan
- (c) Kebijakan pemerintah yang mendukung upaya masyarakat pesisir untuk keluar dari kemiskinan

Selain aspek-aspek tersebut, untuk mengetahui *background* lokasi penelitian, akan dilihat pula kondisi geografis, ekologis dan sosiologis di lokasi yang diteliti.

1.6 Metodologi

Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan komunitas dan pendekatan kebijakan. Pendekatan komunitas dimaksudkan untuk melihat strategi yang telah, sedang dan dilakukan nelayan untuk meningkatkannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Adapun pendekatan kebijakan untuk melihat dukungan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan program-program yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kedua pendekatan ini dilakukan sekaligus,

agar dapat diketahui apakah program-program yang dikembangkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan nelayan, atau sebaliknya, yaitu walaupun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi ternyata tidak dapat diakses oleh nelayan.

Penelitian lapangan dilakukan di daerah Pati (Jawa Tengah), yaitu di Desa Bendar. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada alasan bahwa di daerah ini terdapat desa nelayan yang cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraannya (Kompas, 23 Agustus 2008). Dengan melihat keberhasilan mereka diharapkan akan dapat dijadikan bahan pelajaran (*lesson learn*) tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah lain di Indonesia perlu dilakukan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berupa narasi yang menggambarkan perjuangan nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan, dan menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan nelayan. Selain itu, dengan pendekatan ini peneliti juga akan melihat *success story* dari beberapa nelayan yang oleh masyarakat dianggap cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinannya. Walaupun pendekatan penelitian bersifat kualitatif, namun pengambilan data kuantitatif tetap diperlukan untuk memperdalam hasil penelitian.

Pengambilan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal, masyarakat nelayan, pedagang hasil laut dan para istri nelayan, LSM serta instansi pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penentuan *informan* dipilih melalui sistem *snow ball*. Melalui sistem ini diharapkan informan yang terdahulu akan dapat menunjuk informan lain yang dianggap dapat lebih memperjelas permasalahan, untuk diwawancarai. Dengan sistem tersebut peneliti akan memperoleh dua keuntungan. *Pertama*, tidak perlu bersusah payah menentukan daftar informan, yang tentunya sangat sulit diperoleh sebelum turun ke lapangan. *Kedua*, melalui sistem tersebut, maka

jawaban yang dikemukakan oleh seorang informan akan dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan untuk diajukan kepada informan lain. Dengan demikian pemahaman atas permasalahan yang sama diharapkan akan bisa lebih mendalam.

Untuk keperluan wawancara mendalam, sebelumnya disusun pedoman wawancara (*interview guide*), yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara. Pokok-pokok permasalahan itulah yang kemudian ditanyakan oleh peneliti di lapangan, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Dengan demikian terbuka lebar bagi para peneliti untuk melakukan improvisasi dalam menanyakan permasalahan yang ada.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data statistik, koran, majalah, peraturan perundangan, dan makalah seminar yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi penelitian. Data sekunder yang diperoleh diharapkan dapat lebih memperdalam kajian yang dilakukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa isi. Analisa ini dilakukan dengan cara menggabung-gabungkan aspek-aspek penelitian yang sejenis ke dalam satu kesatuan, kemudian melakukan analisis silang antara satu aspek dengan aspek yang lain. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan teori yang relevan, dan membandingkannya dengan permasalahan serupa yang terdapat di daerah lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati yang terletak antara $111^{\circ}50'$ - $111^{\circ}15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}25'$ - $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan. Kabupaten ini berada sekitar 75 km di sebelah Timur Kota Semarang. Di sebelah Utara, Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

Kabupaten Pati memiliki luas 150.368 ha, dan terdiri dari 21 kecamatan. Lahan di Kabupaten Pati itu terdiri dari lahan sawah seluas 58.448 ha, dan lahan bukan sawah seluas 91.920 ha. Lahan sawah antara terdiri dari pengairan teknis, setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan pasang surut. Lahan bukan sawah terdiri dari rumah dan pekarangan, tegal, padang rumput, perkebunan dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada akhir tahun 2008 sebanyak 1.256.182 jiwa 355.131 KK, terdiri dari laki-laki 620.175 jiwa dan perempuan 636.007 jiwa. Dengan demikian seks ratio penduduk di wilayah ini 97,51, yang berarti tiap 100 orang perempuan terdapat 97 laki-laki. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pati, yaitu 107.512 jiwa, dan paling sedikit berada di Kecamatan Gunungwungkal, yaitu sebanyak 36.670 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.503,68 km², maka kepadatan penduduk di wilayah ini sekitar 830 jiwa per km². Jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 844.568 orang, dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun) sebanyak 405.829 orang.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati

No.	Penggunaan Tanah	Luas (ha)	Persentase
A	Lahan Sawah:	58.448	38,87
	1. Pengairan Teknis	18.150	12,07
	2. Pengairan Setengah Teknis	8.871	5,90
	3. Pengairan Sederhana	7.092	4,72
	4. Pengairan Desa	1.981	1,32
	5. Tadah Hujan	22.162	14,74
	6. Lainnya	192	0,13
B	Lahan Bukan Sawah:	91.920	61,13
	1. Rumah dan Pekarangan	26.258	17,46
	2. Tegall	28.347	18,85
	3. Padang Rumput	2	0,00
	4. Hutan Rakyat	1.667	1,11
	5. Hutan Negara	16.548	11,01
	6. Perkebunan	2.314	1,54
	7. Rawa-rawa	19	0,01
	8. Tambak	10.705	7,12
	9. Kolam	316	0,21
	10. Tanah Lainnya	5.744	3,82
Jumlah		156.368	100,00

Sumber: Pati Dalam Angka 2009

Lebih dari 50% penduduk Kabupaten Pati bekerja di sektor pertanian, baik berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan maupun perikanan. Khusus kegiatan perikanan, hanya sebesar 19.645 orang (1,56%) penduduk yang bekerja di sektor perikanan. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi kegiatan perikanan perairan umum, perairan laut, budidaya tambak, budidaya ikan, bakul dan pengolahan ikan.

Tabel 2.2 Penduduk Kabupaten Pati yang Bekerja di Sektor Perikanan (2008)

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Nelayan Perairan Umum	426
2	Nelayan Perairan Laut	6.197
3	Budidaya Tambak	9.483
4	Budidaya Laut	1.137
5	Bakul	2.101
6	Pengolah Ikan	334
Jumlah 2008		19.645
Tahun 2007		19.510
Tahun 2006		18.465

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

Dari jumlah nelayan sebesar 6.197 orang tersebut, yang berstatus sebagai juragan sebanyak 2.521 orang. Adapun yang berstatus sebagai pandega sebanyak 3.676 orang. Dibandingkan tahun 2007, jumlah penduduk yang bekerja di sektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2006, terdapat kenaikan sebesar 6,4%. Meskipun demikian, kenaikan itu tidak terjadi pada nelayan perairan laut, tetapi sebagian besar terjadi pada jumlah bakul, yaitu dari 901 pada tahun 2006, menjadi 2.101 pada tahun 2008. Adapun pada nelayan perairan laut justru terjadi penurunan; jika pada tahun 2006 dan 2007 sebanyak 6.197 orang, pada tahun 2008 turun menjadi 6.164 orang.

Kabupaten Pati memiliki garis pantai sepanjang sekitar 60 km, yang terbentang dari Kecamatan Batangan di sebelah Timur, sampai dengan Kecamatan Dukuhseti di sebelah Barat. Walaupun sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wilayah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut maksimal sejauh 4 mil, namun dalam praktiknya nelayan di Kabupaten Pati tidak hanya melakukan penangkapan di wilayah laut sejauh 4 mil, namun di seluruh wilayah Laut Jawa, bahkan sampai di kawasan perairan Kalimantan. Oleh karena itu tidak ada

data tentang potensi sumberdaya ikan yang termasuk dalam wilayah sejauh 4 mil, yang merupakan kawasan perairan laut yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Pati.

Data dari Direktorat Jenderal perikanan menunjukkan bahwa pada tahun 1991 luas daerah penangkapan ikan di wilayah perairan Laut Jawa adalah 384.000 km² untuk ikan pelagis, dan 72.000 km² untuk ikan demersal. Kawasan itulah yang realitasnya menjadi *fishing ground* dari nelayan di kabupaten Pati. Pada kawasan perairan tersebut, data tahun 2000 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatannya sudah sangat tinggi, yaitu sebagian besar sudah mencapai di atas 60%, bahkan untuk sumberdaya tertentu sudah di atas 100%. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi *over fishing* di kawasan ini. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak nelayan dari Pati yang melakukan penangkapan sampai di luar Laut Jawa.

Tabel 2.3 Potensi Maksimum Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Laut Jawa (Tahun 2008)

No.	Jenis Sumberdaya	Potensi Maksimum Lestari (Ton)	Tingkat Pemanfaatan (%)
1	Ikan Pelagis	55,0	82,47
2	Ikan Pelagis Kecil	214,2	130,26
3	Ikan Dasar	431,2	56,12
4	Ikan Karang	9,5	121,68
5	Udang	10,8	102,78
6	Udang Karang	0,5	26,00
7	Cumi-Cumi	5,04	101,19

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

Adapun menurut PKSPL-IPB, sebagaimana dikutip dalam Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008, tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan pantai

Kabupaten Pati pada tahun 2002 untuk ikan pantai sudah mencapai 77,62%.

Tabel 2.4 Potensi Maksimum Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Perairan Pantai Kabupaten Pati Tahun 2002

No.	Jenis Sumberdaya	Potensi Maksimum Lestari (Ton/Tahun)	Tingkat Pemanfaatan (%)
1	Ikan Pantai	5.275,00	77,62
2	Udang	264,75	82,38
3	Rajungan	1.311,33	23,14

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

Beberapa prasarana perikanan yang ada di daerah ini adalah pabrik es, PPI/TPI dan Dermaga. Pabrik es terdapat di Kecamatan Pati, Margorejo, Margoyoso, Trangkil dan Juwana. PPI/TPI terdapat di Kecamatan Juwana, Dukuhseti dan Tayu. Adapun Dermaga hanya terdapat di Juwana dan Banyutowo Dukuhseti. Di Juwana ada dua Dermaga, dengan panjang masing-masing 1.296 m dan 1.720 m. Adapun di Dukuhseti panjangnya hanya 250 m. Pada tahun 2008 di Kabupaten Pati terdapat 334 pengolahan ikan. Dari jumlah itu, yang terbanyak adalah di Kecamatan Juwana yaitu 86 pengolahan.

Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Pati dikelompokkan menjadi perikanan laut, tambak, kolam dan waduk. Adapun tingkat produksi pada tahun 2008 adalah perikanan laut sebesar 31.472 ton, tambak 16.659,5 ton, kolam 621,9 ton dan waduk sebesar 22,8 ton. Dengan demikian produksi perikanan terbesar adalah dari perikanan laut dan tambak.

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan laut dan tambak pada tahun 2008 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007. Meskipun demikian, dilihat

dari nilai produksinya justru mengalami peningkatan yang cukup besar.

Tabel 2.5 Volume dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Pati Tahun 2007 dan 2008

No.	Asal Produksi	2007	2008	Peningkatan (%)
1	Perikanan Laut:			
	Produksi (ton)	33.405	31.472	(-5,79)
	Nilai (000)	115.665.147	164.414.750	42,15
2	Tambak:			
	Produksi (ton)	16.769,3	16.559,5	(-0,77)
	Nilai (000)	168.398.918,5	186.617.817,5	10,82
3	Kolam:			
	Produksi (ton)	621,9	625,1	0,51
	Nilai (000)	4.596.140,2	5.048.192,2	9,84
4	Waduk:			
	Produksi (ton)	22,6	22,8	0,88
	Nilai (000)	126.744,5	147.874,5	16,67

Sumber: Selayang Pandang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

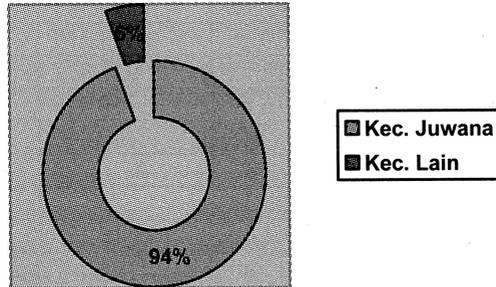
Khusus produksi perikanan laut, data TPI tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah terbanyak berasal dari Kecamatan Juwana, yaitu sebesar 29.713.400 kg dengan nilai Rp157.325.917,-, dengan rincian 5.194.677 kg dari TPI Bajomulyo I dan 24.518.723 kg dari TPI Bajomulyo II. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh produksi perikanan laut sebesar 31.472.063 kg dengan nilai Rp164.414.750,80, maka tingkat produksi dari Kecamatan Juwana mencapai 94,41%, atau jika dilihat dari nilai produksinya sebesar 95,69%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar produksi ikan di Kabupaten Pati berasal dari Kecamatan Juwana.

Tabel 2.6 Produksi Ikan Laut di Kabupaten Pati Tahun 2008

No.	TPI	Produksi	
		Kg	Nilai (Rp)
1	Bajomulyo I Juwana	5.194.677	12.344.350,00
2	Bajomulyo II Juwana	24.518.723	144.981.567,00
3	Pecangaan Batangan	3.923	55.360,00
4	Margomulyo Tayu	3.074	164.059,00
5	Sambiroto Tayu	694	14.400,00
6	Alasdowo Dukuhseti	-	-
7	Banyutowo Dukuhseti	1.565.995	5.517.761,50
8	Puncel Dukuhseti	184.977	1.337.253,30
Jumlah		31.472.063	164.414.750,80

Sumber: Kelautan dan Perikanan Pati Dalam Angka Tahun 2008

Gambar 2.1
Perbandingan Produksi Perikanan Laut Kecamatan Juwana
dengan Kecamatan Lain



Produksi perikanan tersebut sebagian besar berasal dari hasil penangkapan menggunakan *cantrang*, pukat cincin (*purse seine*) dan pancing rawai. Ketiga jenis alat tangkap itulah yang saat ini banyak dimiliki oleh nelayan dari Juwana, termasuk nelayan dari Desa Bendar. Adapun jenis ikan yang ditangkap meliputi ikan pelagis (ikan layang, selar, tembang, tengiri, kembung, lemuru, kerapu, tongkol,

teri, tuna, layur, boloso (kadalan) dan mata besar) dan ikan demersal (petek, manyung, kakap merah, kakap putih, cucut, pati, mremang, bawal, tigawaja, bambangan, ekor kuning, kuniran). Selain itu juga terdapat udang dan cumi-cumi.

Jika produksi perikanan laut terbesar dari Kecamatan Juwana, maka produksi tambak tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, Kayen, Jakenan dan Gabus. Meskipun demikian, di antara kecamatan-kecamatan tersebut, produksi ikan dari Kecamatan Juwana merupakan yang terbanyak.

Tabel 2.7 Luas, Produksi dan Nilai Perikanan Tambak Kabupaten Pati (Tahun 2008)

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Batangan	1.610,17	3.257.989	34.393.671.500
2	Juwana	3.186,87	4.464.146	47.257.725.500
3	Wedarijaksa	767,63	762.074	8.437.693.500
4	Trangkil	1.166,08	2.447.587	26.814.717.000
5	Margoyoso	1.430,16	3.983.259	42.708.949.000
6	Tayu	818,52	931.977	17.630.949.500
7	Dukuhseti	1.316,64	758.976	8.966.104.000
8	Kayen	265	40.260	315.973.500
9	Jakenan	44	-	-
10	Gabus	136,14	-	-
Jumlah		10.744,20	16.646.268	186.525.067.500

Sumber: Kelautan dan Perikanan Pati Dalam Angka Tahun 2008

Pengolahan ikan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi: pemindangan, ikan asin, pemanggangan, pembuatan terasi, pendinginan dan *cold storage*. Adapun jumlah produksi setiap kegiatan pengolahan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Produksi Pengolahan Ikan di Kabupaten Pati Tahun 2008

No.	Jenis Pengolahan	Jumlah Unit	Jumlah Produksi (kg)
1	Pemondangan	104	2.587.067
2	Ikan Asin	21	3.400.149
3	Pemanggang	155	1.404.408
4	Terasi	22	193.401
5	Pendinginan	51	13.807.706
6	<i>Cold Storage</i>	1	421.334
Jumlah		354	21.814.065

Sumber: Selayang Pandang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

2.2 Kecamatan Juwana dan Desa Bendar

Kecamatan Juwana terletak 12 km arah Timur Kota Pati. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pati dan Kecamatan Wedarijaksa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batanean dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jakenan.

Kecamatan Juwana memiliki luas 5.592,598 ha (sekitar 55,94 km²), terdiri dari 1.164,622 ha lahan sawah dan 4.427,976 ha lahan bukan sawah. Rata-rata curah hujan di Kecamatan Juwana sebanyak 97,58 mm dengan 74 hari hujan. Ketinggian wilayah adalah 1 m sampai 4 m, dengan ketinggian rata-rata sekitar 4 m.

Kecamatan Juwana terdiri dari 29 desa, dan dihuni oleh 1.576 jiwa, 25.262 KK, terdiri dari laki-laki 44.035 jiwa dan perempuan 44.090 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Adapun seks rasio sebesar 99,88, yang berarti bahwa dari setiap 100 orang perempuan, terdapat 99 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Growong Lor,

dan penduduk paling sedikit di Desa Jepuro. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini cukup tinggi, yaitu 1.575,63 jiwa per km².

Tabel 2.9 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Juwana

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
I	Lahan Sawah:	1.1.64,622	20,82
	1. Pengairan Teknis	355.290	6,35
	2. Pengairan Sederhana	110.300	1,97
	3. Tadah Hujan	699.032	12,50
II	Lahan Bukan Sawah:	4.427,976	79,18
	1. Pekarangan	999,847	17,88
	2. Tegall	191,690	3,43
	3. Tambak	3.086,867	55,20
	4. Lainnya	149,572	2,67
Jumlah		5.592,598	100,00

Sumber: Kecamatan Juwana Dalam Angka 2008

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 61.226 orang, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun) sebanyak 26.899 orang. Penduduk di wilayah Kecamatan Juwana umumnya memiliki sumber matapencaharian dari kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tanaman pangan di kecamatan ini terdiri dari padi yang meliputi padi sawah dan padi gogo, dan palawija yang meliputi: jagung, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Perkebunan terdiri dari kebun kelapa, kapuk dan tebu. Peternakan yang terbanyak adalah ayam ras dan kambing. Ternak lainnya adalah: sapi, kerbau dan domba.

Produksi perikanan di Kecamatan Juwana sebagian besar dari budidaya tambak, baik tambak bandeng maupun udang. Potensi tambak di Kecamatan Juwana adalah yang terbesar di antara enam kecamatan lain yang memiliki tambak, yaitu: Kecamatan Batangan, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu dan Dukuhseti. Oleh karena Kecamatan Juwana berbatasan dengan laut, maka daerah ini juga

merupakan salah satu penghasil ikan laut di daerah Pati. Selain itu juga terdapat perikanan darat.

Prasarana perikanan laut di Kecamatan Juwana terdapat dua TPI, yaitu TPI Bajomulyo I dan TPI Bajomulyo II. Adapun produksi perikanan di Kecamatan Juwana itu antara lain dapat dilihat pada hasil pelelangan ikan segar di TPI Bajomulyo I dan TPI Bajomulyo II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.¹

Tabel 2.10 Produksi dan Nilai Ikan Basah Hasil Pelelangan Ikan Laut Segar di TPI Bajomulyo I dan Bajomulyo II Menurut Bulan (2007)

No.	Bulan	Produksi (Kg)		Nilai (000 Rp)	
		TPI I	TPI II	TPI I	TPI II
1	Januari	229.432	1.634.240	579.500	5.344.695
2	Februari	310.050	907.204	904.550	3.241.489
3	Maret	331.793	1.284.508	988.000	4.763.889
4	April	322.191	769.950	904.500	3.394.706
5	Mei	352.391	1.014.061	1.087.566	4.182.235
6	Juni	350.578	459.994	871.500	1.972.295
7	Juli	1.189.600	1.078.294	3.527.665	4.103.188
8	Agustus	2.198.183	3.195.217	7.047.390	12.769.600
9	September	2.089.822	3.587.464	5.576.698	11.840.940
10	Oktober	366.463	2.026.905	1.038.580	6.086.856
11	November	1.113.850	2.826.525	2.603.455	12.197.090
12	Desember	799.188	3.652.710	2.014.350	13.363.605
	Jumlah	9.653.541	22.437.072	27.143.754	83.260.605

Sumber: Kecamatan Juwana Dalam Angka 2008

Selain perikanan laut, di Kecamatan Juwana terdapat produksi perikanan darat, walaupun tidak sebesar perikanan laut. Produksi perikanan darat terdiri dari: ikan lele, ikan sungai, ikan kolam campuran.

¹ Data tersebut tidak mencerminkan angka produksi perikanan yang sebenarnya di Kabupaten Juwana, karena TPI tidak melakukan pencatatan langsung terhadap kegiatan jual beli ikan di tempat itu. Hal itu karena TPI tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinya.

Adapun Desa Bendar, secara administratif berada di wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa ini terletak di sebelah Timur Kabupaten Pati, sekitar 14 km; atau sekitar 2,5 km arah Timur Kota Juwana, tepatnya di pinggiran Sungai Juwana, dan di tepi jalan yang menghubungkan antara Pati-Surabaya. Desa Bendar ini cukup dikenal di daerah Juwana khususnya dan Pati umumnya karena dianggap sebagai desa nelayan yang cukup berhasil.

Tabel 2.11 Luas Produksi dan Nilai Produksi Ikan di Kecamatan Juwana (2007)

No.	Jenis Ikan	Luas Area (ha)	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Lele	0,75	19,036	144.311.916
2	Ikan Sungai	15	47,825	258.163.200
3	Kolam Campuran	1,65	3,610	25.176.684

Sumber: Kecamatan Juwana Dalam Angka 2008

Desa Bendar merupakan salah satu dari 406 desa yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Adapun dalam wilayah Kecamatan Juwana, Desa Bendar merupakan satu dari 29 desa yang ada di wilayah Kecamatan Juwana. Adapun Kecamatan Juwana merupakan salah satu dari 35 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati.

Tidak ada penjelasan tentang posisi Desa Bendar. Namun jika mengacu pada posisi Kabupaten Pati yang terletak antara $111^{\circ}50' - 111^{\circ}15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}25' - 7^{\circ}00'$ Lintang Selatan, maka diperkirakan posisi Desa Bendar tidak jauh dari itu. Untuk mencapai Desa Bendar dapat ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, naik bus dari Pati jurusan Lasem atau Surabaya, dan turun di Desa Bendar. *Kedua*, naik angkot dari Pati turun di Juwana, kemudian dari Juwana naik becak motor ke Desa Bendar.

Di sebelah Utara, Desa Bendar berbatasan dengan Desa Growong Lor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumirejo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bajomulyo. Adapun sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trimulyo. Adapun Kecamatan

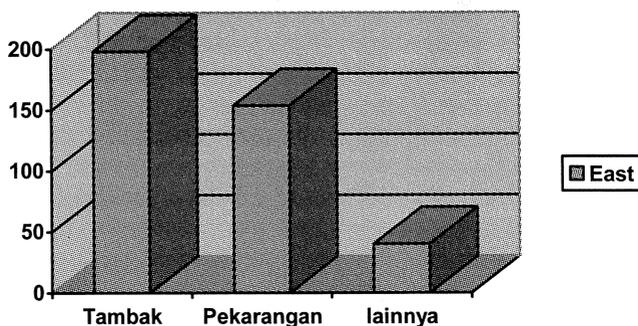
Juwana, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jakenan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pati dan Wedari Jaksa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batangan.

Luas Desa Bendar adalah 198,197 ha. Jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Juwana dengan luas 5.592,598 ha, maka luas Desa Bendar sekitar 3,54% dari keseluruhan luas Kecamatan Juwana.

Desa Bendar berada pada ketinggian 5,80 m dari permukaan laut. Jadi desa ini memiliki ketinggian wilayah yang lebih tinggi dibanding rata-rata ketinggian wilayah di Kecamatan Juwana, yaitu 3 meter. Desa ini berada di kawasan Pantai Utara Jawa, dengan suhu rata-rata sekitar 34⁰ C. Adapun curah hujan di desa ini sekitar 36,8 mm per tahun.

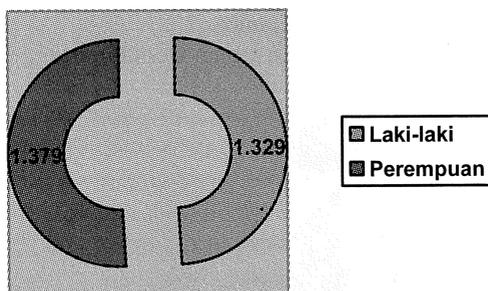
Pemanfaatan lahan di Desa Bendar yang seluas 198,197 ha itu digunakan untuk berbagai keperluan, terutama tambak (153,91 ha), pekarangan (40,293 ha) dan lain-lain sebanyak 3,994 ha. Desa ini memiliki tanah kas desa seluas 26,5 ha. Adapun sawah tidak terdapat di desa ini.

Gambar 2.2
Pemanfaatan Lahan Desa Bendar



Jika jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2008 sebanyak 1.256.182 jiwa. Dan Kecamatan Juwana sebanyak 79.885 jiwa, maka jumlah penduduk Desa Bendar pada bulan April 2009 sebanyak 2.801 jiwa, 25.262 KK, terdiri dari laki-laki 1.399 jiwa dan perempuan 1.402 jiwa. Jika dibandingkan dengan data bulan Februari tahun 2007, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 93 jiwa (3,4%); karena jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 2.708 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.329 jiwa dan perempuan 1.379 jiwa. Dengan demikian jika dibuat rata-rata dalam dua tahun terakhir perkembangan penduduk sebesar 1,7% per tahun. Jumlah penduduk Desa Bendar itu sekitar 3,5% dari jumlah penduduk Kecamatan Juwana secara keseluruhan. Adapun seks rasio di Desa Bendar adalah 96,18. Itu berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 96 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Bendar cukup tinggi, yaitu 1.397,98 per km².

Gambar 2.3
Penduduk Desa Bendar Menurut Jenis Kelamin



Hampir seluruh penduduk di Desa Bendar beragama Islam. Data tahun 2007 menunjukkan hanya ada satu orang yang beragama selain Islam, yaitu Kristen. Dilihat dari usianya, jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok usia 15-19 tahun, kemudian kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun.

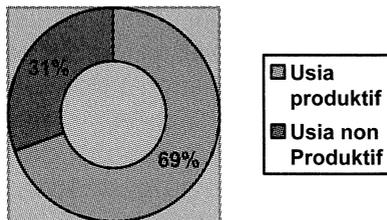
Tabel 2.12 Penduduk Desa Bendar Menurut Kelompok Usia Tahun 2007

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	3.766	3.476	7.242
2.	5- 9	3.658	3.519	7.177
3.	10-14	3.931	3.724	7.655
4.	15-19	4.767	4.402	9.169
5.	20-24	4.320	4.589	8.909
6.	25-29	4.326	4.349	8.675
7.	30-34	3.964	4.022	7.986
8.	35-39	3.486	3.469	6.955
9.	40-44	3.079	2.913	5.922
10.	45-49	2.319	2.143	4.462
11.	50-54	1.581	1.760	3.341
12.	55-59	1.525	1.585	3.110
13.	60-64	1.181	1.446	2.627
14.	> 65	1.598	1.985	3.603

Sumber: Kecamatan Juwana Dalam Angka 2008

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok usia produktif dan kelompok usia tidak produktif. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) di Desa Bendar sebanyak 1.922 jiwa atau sekitar 69,43% dari seluruh penduduk Desa Bendar. Adapun penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebanyak 846 atau sekitar 30,57%.

Gambar 2.4
Penduduk Desa Bendar Usia Produktif dan Bukan Produktif



Penduduk Desa Bendar juga dapat dibedakan dalam kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja. Jumlah penduduk dalam kelompok pendidikan usia 4-15 tahun sebanyak 519 orang, dan jumlah penduduk menurut kelompok tenaga kerja 20-40 tahun sebanyak 1.112 orang.

Tabel 2.13 Penduduk Menurut Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah
1	Menurut Kelompok Pendidikan:	
	4-6	55
	7-12	277
	13-15	187
2	Menurut Kelompok Tenaga Kerja:	
	20-26	425
	27-40	687

Sumber: Data Potensi Desa Tahun 2007

Permukiman penduduk terdiri dari 597 rumah permanen, 10 rumah semi permanen, dan hanya 5 rumah yang tidak permanen. Kondisi rumah ini sekaligus juga menunjukkan kondisi ekonomi masyarakatnya yang cukup makmur. Di desa ini sangat mudah menemukan rumah mewah bertingkat dengan bangunan modern. Begitu pula mobil yang bagus-bagus juga banyak ditemukan di garasi rumah penduduk. Kondisi permukiman sangat padat, sehingga sulit menemukan tanah kosong di desa ini.

Dilihat dari matapencahariannya, sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan lain yang digeluti oleh penduduk adalah tani, pertukangan, karyawan, pensiunan, wiraswasta dan jasa.

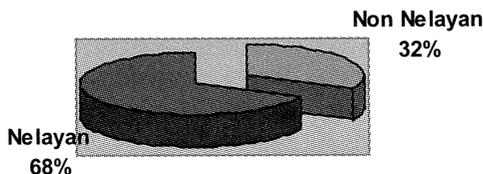
Tabel 2.14 Matapencaharian Penduduk Desa Bendar, Juwana

No.	Matapencaharian	Jumlah
1	Karyawan	35
2	Wiraswasta	299
3	Tani	12
4	Pertukangan	4
5	Pensiunan	1
6	Nelayan	805
7	Jasa	29

Sumber: Data Potensi Desa Tahun 2007

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah nelayan di Desa Bendar sangat dominan. Perbandingan komposisi mata-pencaharian penduduk Desa Bendar yang nelayan dan bukan nelayan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2.5).

Gambar 2.5
Perbandingan Komposisi Matapencaharian Penduduk Desa Bendar



Khusus kegiatan perikanan, di desa ini hampir semua kegiatan perikanan adalah termasuk dalam kategori perikanan laut. Di desa ini juga banyak masyarakat yang bekerja sebagai bakul ikan, karena umumnya isteri-isteri nelayan selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga melakukan jual beli ikan di TPI.

BAB III

STRATEGI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

3.1 Sejarah Ringkas Kenelayanan Desa Bendar

Menurut H. Sariyani, salah seorang tokoh nelayan Desa Bendar paling tua saat ini, sejarah kegiatan kenelayanan di Desa Bendar dimulai sekitar tahun 1940-an. H. Sariyani sendiri memulai usaha perikananannya sejak tahun 1952, dengan mengoperasikan perahu layar warisan kakeknya berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter, dan menggunakan alat tangkap jala. Pada masa itu, alat tangkap yang digunakan nelayan hanya jala dan pancing. Sebagaimana layaknya alat tangkap tradisional, perahu layar dengan alat tangkap jala dan pancing tentu saja tidak mampu mendatangkan hasil tangkapan yang banyak.

Kurangnya hasil tangkapan mengakibatkan H. Sariyani hanya mampu bertahan melaut selama lima bulan. Setelah itu, H. Sariyani memutuskan pindah ke Kendal, sebuah daerah perikanan yang sama-sama termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Pulau Jawa seperti halnya Desa Nelayan Bendar, yang ketika itu dikenal sebagai daerah nelayan yang relatif lebih maju. Kepindahan tersebut merupakan jalan baru baginya untuk belajar dan menimba pengalaman tentang teknik-teknik usaha perikanan laut dari nelayan-nelayan yang lebih berhasil.

Kepindahannya ke daerah perikanan yang baru tersebut bukanlah kepindahan biasa tanpa makna, melainkan gambaran dari sikap seorang nelayan tradisional yang tidak tahan dengan kondisi kemiskinan dan pengelolaan perikanan dengan peralatan seadanya. Kepindahan tersebut juga merupakan keputusan berani yang merefleksikan strategi awal seorang nelayan tradisional bagi pengembangan usaha perikananannya ke depan. Selain itu terlihat

bahwa sektor perikanan laut merupakan suatu aktivitas ekonomi yang cukup dinamis sehingga pengelolaan yang tidak efektif tidak mungkin mendatangkan hasil yang maksimal kecuali jika disertai dengan kemauan yang keras untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan sesama nelayan yang lebih maju.

3.2 Intensifikasi Peralatan Tangkap

Upaya untuk melakukan intensifikasi perikanan antara lain dilakukan oleh H. Sariyani. Pada tahun 1958 mendapat kepercayaan dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk menguji coba empat alat tangkap dari nilon yang dapat dioperasikan dengan kedalaman delapan meter dari permukaan laut. Ia kemudian memodifikasi empat alat tangkap nilon tersebut menjadi jaring yang disambungkan menjadi dua buah, sehingga panjang masing-masingnya menjadi 200 meter. Meskipun masih menggunakan perahu layar, alat tangkap ini ternyata cukup efektif karena dapat mendatangkan hasil tangkapan yang cukup lumayan dan dapat beroperasi dalam segala musim. Pencapaiannya yang tergolong lumayan memancing perhatian nelayan yang lain sehingga mereka kemudian banyak yang tertarik dan ikut pula menggunakannya. Malah ada di antara mereka yang tidak ragu-ragu menjual tambaknya untuk membeli nilon yang dijadikan bahan dasar bagi pembuatan alat tangkap, yang ketika itu hanya dapat dibeli di Jakarta.

Pada tahun 1962, nelayan Desa Bendar mengalami musim paceklik. Menangkap ikan dengan perahu layar berukuran kecil di perairan pantai di sekitar desa mereka tidak lagi menguntungkan. Karena itu, sebagian nelayan terpaksa menjual perahu layar mereka untuk diganti dengan perahu yang lebih besar, sehingga mereka berhasil melaut sampai ke daerah Tayu, Brondong dan Tuban. Apalagi ketika itu banyak nelayan Tuban berhasil menangkap udang putih yang besar-besar.

Musim paceklik ternyata mendatangkan manfaat terselubung dan pelajaran yang berharga bagi nelayan Desa Bendar. Pada satu sisi

diketahui bahwa perluasan kawasan menangkap membuka peluang bagi nelayan untuk mendapatkan jenis-jenis ikan tertentu seperti udang putih sehingga pendapatan mereka meningkat. Pada sisi lain diketahui pula bahwa pencapaian yang demikian itu diperoleh setelah mengoperasikan kapal-kapal perikanan yang lebih besar.

Sebagai nelayan, naluri H. Sariyani mengatakan bahwa udang putih besar itu selain ditangkap menggunakan nilon seharusnya ditangkap dengan dukungan perahu motor. Selanjutnya, pada tahun 1969 ia menerima bantuan gratis *Crash Program* Projasma (Program Jasa Maritim) dari Departemen Perhubungan berupa mesin Kubota 36 PK seharga Rp850.000,-. Bantuan *crash program* tersebut dimaksudkan untuk memodifikasi perahu layar perikananannya agar bisa menangkap ikan di kawasan laut antar pulau. Untuk keperluan modifikasi itu H. Suryani mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp500.000,-. Pada tahun 1972, H. Sariyani mendapat fasilitas pinjaman modal dari Bank BNI 1946 untuk membeli satu unit kapal seharga Rp2.000.000,-. Kapal tersebut dapat menghasilkan ikan senilai Rp300.000,- pada setiap kali operasi penangkapan. Barulah pada tahun 1980 keluar Keppres No. 39/80 yang mengharuskan semua perahu nelayan menggunakan mesin.

H. Sariyani yang kini telah berumur 78 tahun masih tetap menekuni sektor perikanan tangkap menjadi usaha keluarga dengan melibatkan anak-anaknya sebagai penerus. Intensifikasi alat tangkap dan pembaruan kapal terus mereka lakukan sesuai dengan tuntutan dunia perikanan modern untuk memastikan usaha perikanan keluarga mereka terus berkembang. Mereka kini memiliki 5 buah kapal perikanan *purse seine* untuk menjalankan aktivitas perikanan samudra¹ yang beroperasi di Samudra Hindia. Hasil tangkapannya didaratkan di pelabuhan perikanan Muara Baru, Jakarta.

¹ Pada prinsipnya, aktivitas perikanan di perairan laut Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu perikanan pesisir, perikanan nusantara dan perikanan samudra. Aktivitas perikanan pesisir dilakukan di sekitar kawasan pantai oleh nelayan tradisional; aktivitas perikanan

Upaya intensifikasi peralatan tangkap yang bisa dikatakan cukup berhasil juga dialami oleh H. Sumarno. Sepuluh tahun pertama menjalani usaha perikanan tangkap bersama bapaknya dengan menggunakan alat tangkap tradisional, yaitu jaring gondrong untuk menangkap udang. Waktu melaut dengan alat tradisional tersebut adalah sehari penuh. Pergi melaut pagi, sorenya sudah kembali lagi ke pantai.

Sejak tahun 1980-1983, usaha perikananannya meningkat dari menggunakan perahu layar kepada perahu bermesin (mesin Robin) berkapasitas 3-5 PK. Alat tangkap yang digunakan masih jaring gondrong yang dimodali dengan dana sendiri senilai Rp1,7 juta. Dari 1983-1990, ia beralih dari mesin Robin ke mesin Kubota berkapasitas 3,5 dan 5 PK dengan tetap menggunakan jaring gondrong seharga Rp4,5 juta. Waktu melaut berubah dari pergi sore, pulang pagi. Ikan yang ditangkap adalah ikan rajungan, bawal putih. Selain jaring gondrong, ia juga menggunakan jaring pejer untuk menangkap ikan P (pari) dan ikan rajungan.

Usaha perikananannya terus berkembang. Selanjutnya, selama tahun 1990-1994 H. Sumarno mulai mengoperasikan alat tangkap *long line* menggunakan kapal berukuran 10 GT yang bermesin Kubota. Waktu melaut mulai panjang menjadi 2-3 hari sekali melaut. Sejak 1994-1997, mulailah menggunakan pukat *cantrang* dan *holer* dengan kapal berbobot 25 GT yang digerakkan oleh mesin PS Mitsubishi berkapasitas 190 PK. Pada periode ini, H. Sumarno mulai menjalankan usaha perikananannya dengan modal tambahan dari pinjaman bank sebesar Rp15 juta. Ketika itu ia sudah mempunyai empat buah kapal yang mengoperasikan alat tangkap pancing.

Pada tahun 1997, H. Sumarno mulai pula mengoperasikan sebuah kapal *purse seine* atau pukat cincin bekas berbobot 93 GT

nusantara dilakukan oleh kapal-kapal perikanan menggunakan teknologi perikanan modern seperti *purse seine* dan *cantrang* di perairan laut nusantara atau antarpulau, sementara aktivitas perikanan samudara dilakukan di Samudra Hindia atau Samudara Indonesia.

yang dibeli dengan harga Rp220 juta dari nelayan Pekalongan. Untuk membeli kapal yang digerakkan oleh mesin Nissan berkapasitas 300 PK tersebut, ia terpaksa menggunakan uang pinjaman bank sebesar Rp90 juta.

Sejak tahun 1998-2000, H. Sumarno telah memiliki empat buah kapal *purse seine*, masing-masing berbobot 90, 98 (delapan silinder), dan 100 serta 110 GT dengan mesin berkekuatan 350 PK. Kondisi terakhir sampai tahun 2009 ini, H. Sumarno memiliki:

- Tiga buah kapal cakalang, masing-masing berbobot 105, 117, dan 120 GT dengan kekuatan mesin 350 PK atau sepuluh silinder. Kapal tersebut sudah dilengkapi *freezer* yang mencapai suhu 30 derajat Celcius.
- 12 kapal *purse seine* berbobot antara 50-100 GT (8 kapal) dan antara 100-200 GT (4 kapal). Dengan kekuatan mesin antara 300-350 PK.
- Lima buah kapal *holer* berbobot 35 GT.

Keberhasilan upaya intensifikasi peralatan tangkap juga dialami oleh Darto, seorang juragan kapal yang merintis usahanya dari bawah. Berbeda dengan nelayan lain yang memang dari awal berprofesi sebagai nelayan, Darto memiliki latar belakang sebagai petani. Hal itu karena Darto lahir dan besar di daerah pegunungan yang jauh dari laut, yaitu di Muntilan.

Sebelum menjadi nelayan di Desa Bendar, Darto pernah merantau ke Medan, yaitu di Pagar Alam, dan bekerja sebagai petani sawit. Namun itu tidak lama dijalaninya, dan sesudah sekitar 3 tahun, pulang ke Muntilan. Merasa tidak betah di kampung halaman, maka pada tahun 1984 Darto merantau lagi, dan merintis kerja sebagai nelayan. Kali ini tujuannya adalah ke Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Oleh karena di Desa Banyutowo perahu yang digunakan umumnya perahu kecil, maka tidak setiap saat bisa digunakan untuk melaut. Jika terpaksa melaut, maka nelayan mencari daerah yang agak terlindung. Saat itulah Darto sampai ke Desa

Bendar, dan kemudian memutuskan untuk pindah ke Desa Bendar, yaitu pada tahun 1985.

Di Desa Bendar Darto kemudian ikut perahu kecil milik nelayan Desa Bendar, yang menggunakan jaring gondrong. Di Desa Bendar ini kemudian Darto kawin dengan orang Desa Bendar, yang sampai sekarang sudah diberi empat orang anak, dua laki dan dua perempuan.² Setiap kali mengoperasikan jaring gondrong Darto mendapatkan bagi hasil setengah bagian dari hasil bersih yang diperoleh (sesudah dikurangi biaya operasional), dan setengah bagiannya untuk pemilik jaring. Hasil yang diperoleh dari pengoperasian jaring gondrong itu ditabung sedikit demi sedikit, dan tidak digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hasil jerih payah menabung itulah kemudian pada tahun 1990 Darto berhasil membeli perahu kecil, namun tanpa jaring, yang kemudian perahu itu disewakan. Akan tetapi, karena hanya perahu tanpa jaring, maka hasilnya tidak banyak. Oleh karena itu dengan uang tabungan yang dimiliki, sesudah lima bulan Darto berusaha membeli jaring sendiri, yaitu berupa jaring gondrong, untuk menangkap udang.

Akan tetapi, pengoperasian jaring gondrong ternyata tidak semulus yang diharapkan. Karena banyak yang memiliki alat tangkap sejenis, maka hasil dari jaring gondrong tidak banyak. Karena itu kemudian pada saat ada kesempatan, yaitu pada tahun 1994, Darto pindah haluan menjadi nakhoda kapal ikan milik orang lain. Kapal yang dinakhodai oleh Darto itu memiliki kapasitas 15 GT. Sebagaimana tradisi di Desa Bendar, agar nakhoda merasa ikut

² Salah satu anaknya saat ini sudah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., yaitu anak yang kedua. Anak pertama lulus STM, dan sekarang menjadi pengurus kapal yang mengurus belanja keperluan operasional kapal, bengkel untuk perbaikan kapal dan penjualan hasil tangkapan kapal milik Darto. Adapun anak ketiga dan keempat masih kecil-kecil, yang satu baru kelas 6 SD dan satunya baru kelas 4 SD.

memiliki kapal sehingga bertanggungjawab penuh terhadap kapal yang dioperasikan, maka kepada nakhoda diberikan pinjaman saham sebesar 15% dari harga kapal yang dioperasikan (yaitu sekitar Rp20 juta).

Hasil pekerjaan sebagai nakhoda itu oleh Darto selalu ditabung, dan hanya digunakan untuk kebutuhan makan dan kebutuhan pokok lain, dan digunakan untuk membayar hutang saham. Sesudah hasil tabungan dirasakan mencukupi, maka saham yang dimiliki oleh Darto pada kapal yang dinakhodai itu kemudian dijual, dan Darto memutuskan untuk mandiri dengan membeli satu unit kapal *holer* (kapal yang digunakan untuk memancing) dengan bobot 13 GT, dengan harga sekitar Rp200 juta. Dengan memiliki kapal sendiri maka hasil yang didapat menjadi lebih besar, karena sistem bagi hasil menggunakan alat tangkap pancing *holer* ini adalah pemilik mendapatkan bagian dari hasil bersih.

Hasil yang diperoleh sebagai juragan kapal oleh Darto ditabung di bank. Merasa bahwa hasil yang diperoleh sebagai juragan kapal lebih besar, maka Darto berusaha untuk menambah kapal lagi. Oleh karena itu sesudah tabungannya agak banyak, Darto kemudian meminjam uang dari bank sebesar Rp150 juta, dengan agunan sertifikat tanah milik mertuanya. Dengan uang pinjaman bank ditambah dengan hasil menabung maka Darto berhasil memiliki kapal lagi.

Dengan memiliki dua kapal maka penghasilan yang diperolehnya menjadi lebih besar, dan kemampuan untuk menabung juga lebih banyak. Dengan uang hasil tabungan tersebut maka Darto kemudian memesan kapal dengan bobot 30 GT, yang pembuatannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Kapal yang dibuat secara bertahap itu berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar lima bulan. Selain menggunakan uang sendiri, kapal itu juga berhasil diselesaikan karena ada saham dari nelayan lain, sekitar 15% dari harga kapal.

Dengan selesainya kapal itu maka saat ini Darto sudah menjadi juragan yang memiliki tiga kapal, yaitu dua kapal berukuran masing-masing 15 GT, dan satu kapal berukuran 30 GT. Dengan jumlah awak kapal (ABK) sebanyak 15 orang setiap satu kapalnya, maka jumlah ABK yang saat ini menggantungkan hidupnya pada Darto sebanyak 45 orang. Hasil yang diperoleh saat ini menurut pengakuannya tidak tetap, namun sebagai gambaran adalah pada saat operasi terakhir sebelum bulan puasa, satu perahu memiliki hasil bersih sebanyak Rp60 juta, dari hasil penangkapan selama tiga bulan, dan satu perahu memperoleh hasil bersih Rp50 juta. Satu perahu lainnya hanya memperoleh hasil Rp125 juta, dipotong biaya untuk perbekalan Rp95 juta. Sisa Rp30 juta itu dibagi setiap ABK Rp1 juta, sehingga menurutnya dari perahu itu juragan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Selain mengoperasikan kapal, Darto juga mengaku memperoleh hasil dari pengadaan barang untuk perbekalan kapal, namun keuntungan yang diambil tidak banyak. Saat ini Darto juga banyak memberi pinjaman perbekalan kepada nelayan yang membutuhkan, walaupun bukan ABK miliknya. Pinjaman perbekalan itu dalam bentuk barang, seperti supermi dan sejenisnya, yang oleh Darto dibeli dari toko dengan pembayaran kontan. Pembayaran oleh peminjam dilakukan sesudah pulang dari melaut. Pinjaman biasanya hanya diberikan kepada orang yang sudah dikenal, atau peminjam belum dikenal tetapi dijamin oleh nelayan lain yang sudah dikenal. Saat ini jumlah nelayan yang memiliki pinjaman ke Darto sekitar 100 orang, dengan pinjaman rata-rata Rp200.000,- per orang. Pemberian pinjaman ke nelayan lain itu menurut Darto tidak dengan tujuan komersial, tetapi semata-mata untuk menolong. Karena itu Darto tidak memungut bunga, dan hanya mengambil sedikit keuntungan dari selisih nilai barang yang dibeli dari toko dengan yang dipinjamkan ke nelayan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa intensifikasi alat tangkap dan pengoperasian kapal-kapal besar menjadi faktor kunci bagi perkembangan usaha perikanan di Desa Bendar. Dalam konteks

ini terlihat bahwa nelayan Desa Bendar sejak dari awal bersifat terbuka dan cepat tanggap terhadap perkembangan-perkembangan baru seputar dunia perikanan dan kenelayanan. Mereka juga dengan mudah menyesuaikan diri dan beralih ke teknologi perikanan yang lebih maju asalkan terbukti mampu meningkatkan hasil tangkapan. Hal itu berarti bahwa perubahan penggunaan alat tangkap di kalangan masyarakat nelayan Desa Bendar akan terjadi jika ada pioneer yang berani memulai dan memberi contoh.

Jika usaha perikanan di Desa Bendar dilihat dari masa 1950-an, maka H. Sariyani merupakan nelayan generasi pertama. Di Desa Bendar kini terdapat sejumlah nelayan yang tergolong generasi kedua dan seterusnya. H. Supeno, misalnya, adalah nelayan generasi kedua yang menjalankan pula aktivitas perikanan samudra di samping aktivitas perikanan nusantara yang hingga kini tetap ditekuni dengan setia oleh para nelayan Desa Bendar pada umumnya.

Aspek historis di atas menggambarkan bahwa aktivitas perikanan tangkap nelayan Desa Bendar tumbuh dan berkembang dari bawah. Meskipun hingga saat ini terdapat hanya beberapa orang nelayan saja yang mampu menjalankan usaha perikanan samudra, aktivitas perikanan tangkap komunitas nelayan desa tersebut telah berkembang pesat. Mereka mengoperasikan berbagai alat tangkap modern dengan dukungan kapal-kapal besar berukuran hingga di atas 70 GT yang mempunyai mesin berkapasitas besar hingga di atas 400 PK. Selain itu, wilayah operasi tidak lagi terbatas di Laut Jawa, tetapi sudah meluas ke kawasan seperti perairan sekitar Pulau Masalembu, Kalimantan Selatan dan Selat Makassar.

3.3 Pendirian Koperasi Nelayan

Keinginan untuk memperoleh hasil tangkapan yang berlebih telah mendorong para nelayan melakukan intensifikasi teknologi alat tangkap tahap kedua yang lebih maju sesuai kebutuhan. Ini merupakan bentuk dari perkembangan usaha perikanan yang lebih maju dari periode sebelumnya. Selain alat-alat tangkap tradisional,

paling tidak terdapat tiga jenis alat tangkap andalan yang digunakan oleh nelayan Desa Bendar hingga kini, yaitu *purse seine* atau pukot cincin, pukot *cantrang*, dan pancing atau *holer*. Alat tangkap *purse seine* mulai dioperasikan kapal-kapal motor berbagai ukuran pada tahun 1974 setelah belajar dari nelayan Pekalongan.³ Sejak itu secara perlahan hingga tahun 1984, kondisi ekonomi nelayan yang tadinya miskin dengan lingkungan desa yang kumuh, mulai membaik.

Oleh karena modal yang diperlukan untuk mengoperasikan *purse seine* cukup besar, maka para nelayan melakukan koordinasi dan kerjasama permodalan melalui sistem penanaman saham. Kesempatan bekerjasama seperti itu mereka lakukan antara lain juga untuk menghindari agar mereka tidak saling cemburu dan bersaing. Pada tanggal 12 Desember 2000, para nelayan *purse seine* berhasil membentuk sebuah paguyuban yang mereka beri nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Rukun Santosa, dengan tujuan untuk memperkokoh kerjasama antarsesama nelayan. Data terakhir KSU tersebut menunjukkan kapal-kapal *purse seine* saat ini berjumlah 26 buah. Jenis-jenis ikan hasil tangkapan *purse seine* antara lain adalah: ikan layang, ikan kembung, ikan sero, udang putih, udang krosali,

³ Tentang awal pengoperasian *purse seine* di Laut Jawa, lihat J.G. Butcher, "Extending The Frontier: The Marine Fisheries of Southeast Asia Since 1850", dalam *Proceedings of Socio-Economics, Innovation and Management of the Java Sea Pelagic Fisheries*. Seminar SOSEKIMA, Bandung, Jawa Tengah, 4-7 Desember 1995, hal. 19. Ia menyatakan bahwa pengoperasian alat tangkap *purse seine* di Laut Jawa, merupakan satu bentuk perubahan teknologi penangkapan ikan setelah Perang Pasifik yang menyebabkan produksi ikan meningkat dengan pesat. Penggunaan alat tangkap *purse seine* terjadi menyusul pengoperasian *otter trawler* oleh nelayan-nelayan Jepang yang dimulai pada tahun 1920 dengan memperkenalkan mekanisasi '*otter trawl*' dan '*purse seine*'. Secara beruntun, penyebaran perubahan teknologi tersebut terjadi mulai dari Filipina, menggunakan mesin dan perahu yang ditinggalkan oleh tentara, kemudian merambat ke Teluk Thailand dengan dana bantuan Jerman, dan selanjutnya ke Selat Malaka, Laut Jawa dan akhirnya ke Laut Arafura.

ikan tongkol, ikan rajungan, ikan belanak, ikan kakap merah, dan ikan mremang. Masa-masa efektif melaut kapal *purse seine* adalah bulan Maret sampai bulan Desember.

Sejak tahun 1992, hasil tangkapan *purse seine* mulai menurun. Maka muncul kemudian gagasan untuk memperpanjang masa menangkap dari satu bulan menjadi dua hingga tiga bulan. Akan tetapi permasalahan baru kemudian muncul, yaitu masa melaut yang lebih lama mengakibatkan mutu ikan hasil tangkapan turun. Menghindari hal demikian, para nelayan berhasil menemukan jalan keluar dengan menjual sebagian hasil tangkapan di tengah laut kepada pembeli atau pengumpul yang pada umumnya berasal dari Kalimantan Timur. Penjualan ikan di tengah laut mampu membawa manfaat tambahan, sehingga penjualan hasil tangkapan sebulan dapat mengembalikan biaya perbekalan yang mencapai 100 hingga 150 juta rupiah.

3.4 Ekstensifikasi Peralatan Tangkap: Penggunaan *Cantrang*

Dalam menjalankan aktivitas rutin perikanan tangkap, para nelayan selalu berpikir untuk memperoleh pendapatan yang terus bertambah guna meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Meskipun alat tangkap *purse seine* merupakan salah satu jenis alat tangkap andalan, sebagian nelayan dalam dua dekade terakhir mulai menganggapnya tidak lagi efektif dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini disebabkan karena hasil tangkapan yang cenderung menurun di samping masa melaut yang cukup lama hingga mencapai dua bulan. Oleh karena itu, sejak akhir 1980-an mereka mulai mencoba beralih ke alat tangkap *cantrang* yang dioperasikan pertama kali oleh nelayan Tegal. Mereka menganggap *cantrang* lebih menguntungkan karena hasil tangkapannya lumayan banyak. Selain itu, masa melautnya lebih pendek daripada *purse seine*, yaitu sekitar satu bulan. Sebelum menangkap ikan-ikan demersal yang dapat dipasarkan, pada mulanya *cantrang* beroperasi untuk menangkap ikan-ikan demersal yang dijadikan sebagai umpan bagi alat tangkap pancing.

Hasil tangkapan *cantrang* yang tergolong tinggi mengakibatkan jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah. Data terakhir Paguyuban Cantrang Mina Santosa, jumlah kapal *cantrang* di Desa Bendar saat ini adalah sebanyak 87 kapal yang dimiliki oleh sekitar 30 orang lebih nelayan. Karena wilayah operasinya di luar Laut Jawa, seperti di perairan Pulau Masalembo, kawasan laut sekitar Kalimantan Selatan dan Selat Makassar, maka sekitar 85 persen kapal-kapal *cantrang* berukuran besar, yaitu antara 50 GT sampai 80 GT. Alat tangkap *cantrang* nelayan Desa Bendar agak berbeda dengan bentuk aslinya dari Tegal. Sesuai watak nelayan Desa Bendar yang suka berinovasi, maka mereka kemudian memodifikasi *cantrang* sedemikian rupa hingga hasil tangkapannya terbukti lebih baik dari *cantrang* yang asli.

Ikan-ikan hasil tangkapan *cantrang* pada umumnya adalah ikan-ikan dasar yang relatif kecil ukurannya, seperti ikan kapasan, ikan muniran, ikan balak atau ikan brusok, dan ikan abangan. Menurut pengakuan nelayan *cantrang*, ikan-ikan tersebut sulit membesar dan biasanya akan mati setelah berumur tiga bulan. Oleh karena itu, meskipun pada prinsipnya *cantrang* dilarang, nelayan tetap terdorong untuk mengoperasikannya dengan maksud antara lain agar ikan-ikan tersebut tetap memberikan manfaat dan tidak hilang percuma begitu saja.

Meskipun memiliki keunggulan, operasi setiap kapal *cantrang* dalam setiap trip melaut tidak selamanya menguntungkan. Biaya operasional/perbekalan sebuah kapal *cantrang* berukuran di atas 70 GT adalah antara Rp90 sampai Rp115 juta. Biaya perbekalan tersebut terdiri dari solar, es batu, belanja pasar/bahan pangan selama melaut, belanja *yayak* (peralatan kapal seperti kipas mesin, olie, sarung tangan, pelampung, pancing dan perlengkapan lainnya), dan belanja *jobo* (seperti las, biaya izin pelayaran, kapal pandu, kapal air). Hasil tangkapan mencapai antara Rp110 juta hingga Rp150 juta. Jika selesih antara nilai perbekalan dan nilai jual kotor hasil tangkapan satu trip kapal *cantrang* sekitar Rp20 juta, maka aktivitas melaut satu trip tersebut dapat dikatakan rugi atau *minus*.

Sistem bagi hasil dari penangkapan menggunakan alat *cantrang* adalah sebagai berikut. Sesudah ikan dijual, sebelum dikurangi dengan ongkos yang dikeluarkan untuk produksi, seperti beli minyak dan belanja kebutuhan lainnya untuk melaut, hasil penjualan dikurangi terlebih dulu sebesar 8 persen sebagai biaya taktis (biaya tak terduga) dan bonus bagi ABK maupun pemilik kapal. Dari nilai 8 persen tersebut, separuhnya untuk nakhoda kapal dan seperempat untuk tokoh ABK dan KKM atau yang mempunyai tanggung jawab lebih besar seperti motoris, dan seperempat sisanya untuk pemilik kapal. Separuh dari hasil bersih setelah dipotong 8 persen dan biaya perbekalan adalah untuk pemilik kapal dan separuhnya lagi untuk ABK yang berjumlah 16 sampai 20 orang. Jika diperhatikan, jumlah pendapatan nakhoda rata-rata lima kali lipat pendapatan ABK, sementara ABK yang berfungsi sebagai KKM memperoleh pendapatan sekitar satu setengah kali pendapatan ABK. Adapun pendapatan tokoh ABK sedikit lebih tinggi dari pendapatan ABK karena ia mendapat tambahan pendapatan dari bagian bonus yang 85 persen dari pendapatan kotor, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan nakhoda. Sebagai contoh, pada Tabel 3.1 dapat dilihat bentuk konkret sistem pendapatan pada kapal *cantrang* bernama "Puji Pangestu 3", milik nelayan Kusrin.

Tabel 3.1 Sistem Bagi Hasil Pendapatan Kapal *Cantrang*

Kategori	Jenis Perbelanjaan dan Pendapatan	Nilai (Rp)
A	Hasil Pendapatan	146.000.000,-
B	Bonus (A x 8%)	11.680.000,-
Jumlah A-B		134.320.000,-
C	Biaya operasi/perbekalan:	
	• Solar	45.300.000,-
	• Es	11.750.000,-
	• Perlengkapan kapal (olie, tali, dsb)	15.067.000,-
	• Ransum/biaya dapur	8.000.000,-
	• Biaya lain-lain (<i>yayak</i> dan <i>jobo</i>)	12.675.000,-
	Jumlah:	92.792.000,-
D	Pinjaman/Bon sebelumnya	3.000.000,-
Jumlah C - D		89.792.000,-

Hasil Bersih: Jumlah (A-B)-jumlah (C-D)		44.528.000,-
E	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan majikan/pemilik kapal (50% x Rp44.528.000,-) • Pendapatan tambahan bagi majikan (B x 25%) Jumlah:	22.264.000,- 2.920.000,- 25.164.000,-
F	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Anak Buah Kapal (ABK), termasuk nakhoda (50% x Rp44.528.000,-) • Pendapatan setiap ABK (Rp264.000,-: 16,5) • Pendapatan tambahan bagi nakhoda (B x 50%) • Pendapatan tambahan bagi 2 orang KKM dan seorang tokoh ABK (B x 25%) 	22.264.000,- 1.439.000,- 5.480.000,- 2.920.000,-
G	Pendapatan bersih ABK: <ul style="list-style-type: none"> • Nakhoda (Rp1.439.000 + Rp5.480.000) • KKM 1 (Rp1.439.000 + (Rp2.920.000: 7) • KKM 2 (Rp1.439.000 + (Rp2.920.000: 7) • Tokoh ABK (Rp1.439.000) + (tidak pasti) 	7.279.000,- 1.856.000,- 1.856.000,- 1.439.000,- +

Sektor perikanan laut merupakan usaha ekonomi nelayan yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan target pencapaiannya. Keadaan cuaca, kepakaran nakhoda dan nasib seringkali menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan hasil tangkapan kapal tidak stabil dan berfluktuasi. Kadang-kadang hasil tangkapan maksimal dan adakalanya kurang dari harapan. Gambaran akan ketidakpastian hasil tangkapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pendapatan Kapal *Cantrang* dalam Setiap Operasi Menangkap Ikan (Rp'000)

Kapal <i>Cantrang</i> Puji Pangestu 3	Tanggal Pulang Dari Operasi Menangkap Ikan					
	14 Nov. 2008	20 Feb. 2008	9 Feb. 2009	27 Maret 2009	14 Mei 2009	17 Juni 2009
Perbekalan	123.231,-	91.900,-	90.000,-	92.792,-	87.7600,-	86.510,-
Hasil Kotor	148.000,-	170.000,-	210.000,-	146.000,-	151.000,-	153.000,-
Biaya Taktis dan Bonus	11.840,-	13.600,-	16.800,-	11.680,-	12.080,-	12.240,-
Hasil Bersih	22.929,-	64.500,-	103.200,-	44.528,-	53.920,-	54.250,-
Pendapatan Pemilik	11.464,-	32.250,-	51.600,-	22.264,-	26.960,-	27.125,-
Pendapatan ABK	573,-	1.842,-	2.948,-	1.349,-	1.348,-	1.425,-
Pendapatan Nakhoda	3.523,-	5.242,-	7.148,-	4.269,-	4.368,-	4.485,-
Pendapatan KKM	2.265,-	3.785,-	5.348,-	3.018,-	3.073,-	3.174,-
Pendapatan Tokoh ABK	573,- (+)	1.842,- (+)	2.948,-	1.349,- (+)	1.348,- (+)	1.425,- (+)
Kapal <i>Cantrang</i> Puji Pangestu 4	Tanggal Pulang Dari Operasi Menangkap Ikan					
	13 Nov. 2008	17 Des. 2008	9 Feb. 2009	29 Maret 2009	18 Mei 2009	28 Juni 2009
Perbekalan	157.900,-	119.000,-	116.960,-	115.020,-	119.010,-	123.355,-
Hasil Kotor	176.000,-	200.000,-	252.000,-	150.700,-	189.000,-	172.000,-
Biaya Taktis dan Bonus	14.080,-	16.000,-	20.160,-	12.056,-	15.120,-	13.760,-
Hasil Bersih	18.100,-	64.550,-	114.880,-	29.024,-	58.880,-	40.885,-
Pendapatan Pemilik	9.050,-	32.275,-	57.440,-	14.512,-	29.440,-	20.442,-
Pendapatan ABK	573,-	1.536,-	2.730,-	725,-	1.436,-	973,-
Pendapatan Nakhoda	4.093,-	5.536,-	7.770,-	3.379,-	5.216,-	4.413,-
Pendapatan KKM	2.584,-	3.822,-	5.610,-	2.447,-	3.596,-	2.939,-
Pendapatan Tokoh ABK	573,- (+)	1.536,- (+)	2.730,- (+)	725,- (+)	1.436,- (+)	973,- (+)

3.5 Sistem Pengelolaan Usaha Perikanan Berbasis Saham (Profit-Sharing)

Nasib ABK pada umumnya sulit berubah karena nilai pendapatan tidak seimbang dengan biaya dan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Meskipun demikian, harapan tentang perubahan nasib masih cukup terbuka lebar bagi nakhoda yang pendapatannya jauh lebih tinggi. Itu pun dengan syarat yang bersangkutan hemat dan cerdas dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Dalam arti kata lain, mereka dituntut untuk hemat dan berani prihatin menjalani hidup. Sikap hidup hemat dan prihatin inilah yang telah terbukti mampu mengantarkan para nelayan pemilik kapal yang tergolong sukses itu dari posisinya semula sebagai ABK puluhan tahun silam ke keadaan sekarang sebagai nakhoda.

Selain itu, harapan untuk mengubah nasib menjadi nelayan sukses seperti pemilik kapal makin terbuka karena keperpihakan pemilik kapal terhadap nakhoda dan ABK, termasuk mereka yang mempunyai hubungan tali persaudaraan dengan pemilik, dengan menanamkan saham pada kepemilikan kapal sebatas kesanggupan mereka. Nakhoda diberi kesempatan untuk menanamkan saham antara 10 persen sampai 15 persen dari nilai kapal berikut peralatannya. Banyak nakhoda cukup arif menangkap peluang ini sehingga tidak seluruh gaji atau pendapatan mereka bawa pulang ke rumah. Sebagiannya mereka titipkan kembali kepada pemilik kapal sebagai saham. Dari persentase tersebut, pemilik kapal yang baik malah memberi pinjaman khusus kepada nakhoda sebanyak setengah dari jumlah saham tanpa dikenakan bunga, sementara setengahnya lagi dapat dicicil dari hasil saham dan pendapatan sebagai nakhoda.

Nelayan Desa Bendar tergolong kreatif dalam menciptakan suasana hubungan kerja antara pemilik kapal dan ABK maupun dengan sesama ABK. Di samping saham kepada nakhoda, pemilik kapal juga membuka peluang bagi bukan nelayan untuk menanam saham secara murni tanpa turut serta dalam pengoperasian kapal

sebagaimana halnya nakhoda dan ABK. Ada dua bentuk pembagian saham yang terlihat cukup unik, yaitu pemberian saham oleh nakhoda kepada ABK yang diambilkan dari sahamnya sendiri, dan cara membayar saham kepada pemilik kapal. Dalam hal ini, pemilik kapal menanggihkan gaji nakhoda untuk digunakan bagi membangun rumah atas nama nakhoda bersangkutan. Rumah tersebut kemudian diagunkan/dijaminakan kepada bank untuk memperoleh modal yang dijadikan sebagai saham nakhoda.

Kebijakan manajemen perikanan berbasis *profit-sharing* dalam berbagai bentuk pembagian saham tersebut dimaksudkan oleh pemilik kapal untuk mendatangkan nilai tambah (*value added*) bagi meningkatkan kepedulian dan kesungguhan nakhoda dan ABK dalam mengoperasikan kapal dan alat tangkap secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, diharapkan hasil tangkapan dan pendapatan akan meningkat. Oleh karena itu, hubungan antara pemilik kapal dan ABK merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling bergantung dan menguntungkan. Hubungan tersebut terlihat dibangun di atas perinsip-prinsip keterbukaan dan keinginan untuk maju secara bersama-sama. Malah ada pemilik kapal yang membagikan saham sebesar 30 persen sampai 50 persen kepada nakhoda dan pengurus kapal⁴ yang berasal dari keluarga sendiri, seperti sepupu dan adik dari kakak iparnya.⁵

Manajemen pengelolaan perikanan tangkap yang berbasiskan sistem *profit-sharing* tersebut menunjukkan tingginya semangat pemilik kapal dan ABK dalam mengelola aktivitas perikanan secara produktif dan kekeluargaan. Dalam konteks ini, para pemilik kapal tidak berpikir untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin bagi

⁴ Pengurus kapal adalah orang yang terlibat dalam mengurus perbekalan dan kelengkapan kapal sebelum berlayar serta bertanggung jawab atas pendaratan hasil tangkapan dan mengawasi proses penjualannya. Pengurus kapal bisa terdiri lebih dari satu orang sesuai dengan volume beban tugas mereka.

⁵ Ini terjadi pada kapal yang dimiliki oleh nelayan Kusrin.

dirinya saja, melainkan berusaha menciptakan kondisi kerja yang kondusif agar semua pihak dapat menikmati hasil perikanan dan hidup dengan layak. Mereka pun turut memikirkan kesejahteraan nakhoda dan ABK agar suatu saat nanti bisa pula memiliki kapal seperti mereka. Apalagi, mereka sendiri tidak secara tiba-tiba muncul sebagai pemilik kapal seperti saat ini. Puluhan tahun silam mereka juga merupakan ABK dan nakhoda yang bekerja pada pemilik kapal keturunan Cina. Mereka berhasil bangkit dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pengusaha perikanan Cina karena tekad dan kerjasama yang kuat dengan sesama ABK melalui usaha patungan untuk membeli kapal dari modal yang mereka kumpulkan dan mengoperasikannya secara bersama-sama.

Keberhasilan nelayan Desa Bendar hingga saat ini mampu memiliki beberapa kapal merupakan hasil dari usaha kerja keras mereka dan pola penanaman modal berkelanjutan yang mereka terapkan. Sebagian besar dari keuntungan yang mereka peroleh mereka investasikan kembali untuk memperbaiki kapal yang ada dan membeli kapal-kapal baru yang disesuaikan dengan tuntutan masanya. Bagi nelayan, sebelum beroperasi kapal harus dipastikan dalam keadaan sangat baik sehingga diharapkan dapat menghasilkan tangkapan yang berlimpah. Bagaimanapun kerusakan yang terjadi ketika kapal beroperasi akan mendatangkan kerugian besar kepada pemilik karena hampir dapat dipastikan hasil tangkapan tidak akan maksimal atau malah mungkin tidak akan mendatangkan hasil sama sekali. Oleh karena itulah, menjaga kondisi kapal agar tetap sehat serta membuat kapal-kapal yang baru merupakan investasi yang tak terpisahkan di mata nelayan dalam usaha perikanan yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berorientasi masa depan.

3.6 Etos Kerja Produktif

Keberhasilan nelayan Desa Bendar bukan hanya disebabkan karena menggunakan teknologi perikanan modern, *purse seine* dan *cantrang*, melainkan juga karena etos kerja yang kuat dan produktif. Begitu bertolak ke laut untuk menangkap ikan, mereka pantang

pulang lebih awal jika hasil tangkapan baru sedikit. Oleh karena itu, mereka akan bekerja keras agar mendapatkan hasil tangkapan yang banyak sebagai cerminan dari etos kerja yang produktif. Agar hasil tangkapan melimpah, mereka sanggup membuang jaring sampai batas maksimum, yaitu 11 kali sehari, sementara menurut pengamatan PT Manggalindo pada tahun 2007, nelayan-nelayan di tempat lain rata-rata hanya mampu membuang jaring hanya sampai 5 kali saja sehari.⁶

Selain etos kerja produktif, nelayan Desa Bendar dikenal pula ulet dan memiliki potensi inovatif yang tinggi sehingga mampu memodifikasi berbagai jenis alat tangkap yang bisa dioperasikan dalam segala cuaca dan musim. Kemampuan berinovasi tersebut tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba melainkan buah dari hasil kerja keras dan kemauan yang kuat untuk mempelajari perkembangan-perkembangan baru seputar dunia perikanan dari nelayan-nelayan yang lain.

Etos kerja produktif tersebut sangat jelas terlihat jika dibandingkan dengan komunitas Desa Bajomulyo yang bertetangga dengan komunitas Desa Bendar. Kedua desa tersebut dipisahkan oleh sungai (muara) yang menjadi jalan masuk dan keluar bagi kapal-kapal perikanan nelayan yang hendak pergi dan pulang dari menangkap ikan di laut. Walaupun lokasi desanya berdekatan, namun karakter dan semangat kenelayanan masyarakat kedua desa tersebut sangatlah berbeda. Desa Bendar tepat dijuluki desa nelayan karena mayoritas penduduknya adalah nelayan perikanan tangkap yang mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap modern maupun tradisonal. Oleh karena itu hampir seluruh kapal perikanan yang merapat di pelabuhan sungai tersebut adalah milik para nelayan Desa Bendar. Sementara Desa Bajomulyo bukanlah tergolong desa nelayan karena hanya satu dua saja penduduknya yang menjalankan aktivitas kenelayanan perikanan tangkap. Padahal, dua buah Tempat

⁶ Wawancara Kepala Desa Bendar, Juli 2009.

Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di pinggir muara sungai tersebut berada di wilayah Desa Bajomulyo.

3.7 Diversifikasi Usaha Perikanan

Dari sisi keanekaragaman usaha perikanan nelayan Desa Bendar, terdapat sekurang-kurangnya empat jenis usaha yang berkaitan dengan aktivitas perikanan tangkap, yaitu aktivitas bakul, pengolahan hasil tangkapan melalui usaha-usaha pengeringan dan pengasinan, pengasapan, dan pemindangan ikan. Selain itu terdapat juga usaha perbengkelan oleh pemilik kapal. Dari semuanya itu, usaha perbengkelanlah yang berkaitan langsung dengan upaya nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, sementara yang lainnya merupakan bagian dari aktivitas dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

3.7.1 Usaha Perbengkelan

Keberadaan bengkel bagi aktivitas nelayan perikanan tangkap adalah mutlak. Setiap kapal perikanan yang akan melaut harus dipastikan terlebih dahulu berada dalam kondisi prima, baik mesin, kondisi kapal maupun peralatan tangkap. Kerusakan mesin, bodi kapal dan peralatan merupakan hal yang lumrah dalam setiap pulang dari melaut. Perbaikannya akan memakan waktu lama karena kapal-kapal yang akan direparasi harus antri menunggu giliran. Oleh karena itu, sebagian nelayan pemilik kapal seperti Kusrin memilih berinvestasi dengan modal pinjaman bank sebesar Rp500 juta untuk membangun bengkel sendiri. Memiliki bengkel sendiri dapat mendatangkan keuntungan ganda. Selain kapal-kapal milik sendiri selalu terpelihara dan berada dalam kondisi terbaik, bengkel akan mendatangkan pendapatan tambahan dari jasa perbaikan dan servis kapal-kapal perikanan yang lain.⁷

⁷ Wawancara Kusrin. Desa Bendar, Juli 2009.

3.7.2 Usaha Perbakulan

Usaha perbakulan adalah suatu usaha membeli ikan-ikan hasil tangkapan kapal nelayan dari berbagai jenis kapal dan alat tangkap untuk dijual kembali kepada pengguna (*user*) yang terdiri dari industri pengolahan hasil perikanan dan pasar-pasar rakyat. Para bakul umumnya adalah kaum perempuan istri dan keluarga nelayan yang berusaha mencari penghasilan tambahan keluarga selain pendapatan suami sebagai nelayan. Ada juga para perempuan bakul tersebut bukan merupakan keluarga nelayan. Mereka sepenuhnya merupakan perempuan kreatif yang memilih usaha perdagangan di sektor perikanan ikan.

Mereka memulai aktivitas perbakulan setiap hari mulai pukul 02.00 dini hari hingga shubuh ketika kapal-kapal perikanan masuk ke pelabuhan perikanan di dermaga TPI I dan TPI II Desa Bajomulyo, yang terletak tepat di seberang Desa Bendar yang dipisahkan oleh sungai yang menjadi jalur masuk kapal-kapal perikanan ke dermaga TPI. Kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan TPI lebih awal biasanya tetap menunggu pembongkaran hasil tangkapan hingga dini hari. Pembongkaran hasil tangkap pada waktu malam akan menyulitkan bakul untuk mengurus dan menjual ikan-ikan kepada pembeli secepatnya.

Sekurang-kurangnya terdapat lima orang bakul perikanan besar di sekitar TPI I dan TPI II. Empat orang bakul tersebut adalah penduduk Desa Bendar sementara seorang lagi merupakan penduduk Desa Bajomulyo. Para bakul besar tersebut menjual kembali ikan-ikan hasil tangkapan kapal-kapal perikanan ke industri pengolahan di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta. Sistem penjualan ke industri bervariasi sesuai kesepakatan antara bakul dan industri bersangkutan. Sebagian industri menerapkan sistem imbalan atau *fee* bagi bakul. Dalam hal ini, bakul bertugas membeli ikan hasil tangkapan dan mengolah dengan membuang kepalanya di bawah pengawasan pihak industri dan kemudian mengirimnya menggunakan

truk sewa atau truk milik mereka sendiri. Tenggat waktu pembayaran dari industri ke bakul biasanya adalah satu minggu.

Selain menggunakan sistem *fee*, sistem penjualan kepada industri juga menggunakan sistem penjualan langsung sesuai harga yang disepakati kedua pihak. Sistem kedua ini cenderung berisiko karena harga pembelian ikan kadangkala lebih tinggi dari harga permintaan/penetapan industri. Selain itu, ikan-ikan yang dianggap kurang bermutu akan dikembalikan lagi atau *reject* kepada bakul.

Seperti disinggung di atas, penjualan sebagian ikan hasil tangkapan sudah dilakukan lebih dulu di tengah laut kepada pengumpul. Sebagian pengumpul akan membawanya menggunakan kapal sendiri ke pelabuhan TPI Juwana di Desa Bajomulyo sementara sebagian lagi membawanya ke pelabuhan-pelabuhan perikanan lain seperti ke pelabuhan perikanan di Kalimantan. Menurut pengakuan pengumpul, agar usaha bakul ini untung, maka nilai jual ikan sekurang-kurang harus lebih tinggi Rp2.000–Rp2.500 daripada nilai beli di tengah laut. Jika nilai selisih tersebut tidak terpenuhi, maka pengumpul dipastikan rugi. Dalam satu minggu aktivitas mengumpulkan ikan di laut, pengumpul akan mengeluarkan biaya operasional tambahan sebanyak 5 juta rupiah dan biaya retribusi di TPI sebanyak 500 ribu rupiah.

Keabsahan aktivitas bakul dan penjualan ikan di tengah laut selain menunjukkan keanekaragaman usaha perikanan sekaligus membuktikan gagalnya TPI memainkan perannya sebagai fasilitator pelelangan ikan. TPI I yang merupakan tempat berlabuh kapal-kapal perikanan *cantrang* dan pancing, dan TPI II tempat berlabuh kapal-kapal perikanan *pure seine*, memang sudah sejak lama tidak lagi berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan. Penjualan semua hasil perikanan tangkap dilakukan oleh bakul.

Nelayan yang bekerja di atas kapal memang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk ikut terjun ke dalam usaha-usaha perikanan tersebut. Karena itu sebagian dari istri-istri mereka mengisi peluang tersebut sebagai kegiatan yang dapat mendatangkan

tambahan pendapatan bagi keluarga mereka. Lebih-lebih lagi usaha bakul yang menjadi salah satu faktor kunci bagi kemajuan usaha perikanan tangkap pada umumnya dijalankan oleh perempuan. Aktivitas perikanan tangkap di Desa Bendar tidak akan berjalan lancar tanpa keikutsertaan para bakul yang berfungsi sebagai pembeli pertama/pembeli perantara hasil tangkapan dari nelayan, karena Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di pelabuhan tidak berfungsi sebagai pembeli perantara sebagaimana mestinya. Dalam konteks usaha perbakulan ikan, sebuah catatan patut dimasukkan di sini, bahwa para pebakul ikan tersebut pada umumnya adalah istri-istri nelayan Desa Bendar. Ada juga seorang bakul yang berasal dari Desa Bajomulyo yang terletak di pinggir pelabuhan pendaratan ikan.

3.7.3 Usaha Pengeringan dan Pengasinan

Tidak seluruh ikan hasil tangkapan langsung dikirim dalam bentuk segar ke industri dan pasar-pasar rakyat. Ada juga di antaranya yang dikeringkan dan diasinkan. Bagaimanapun usaha pengeringan dan pengasinan ikan tidaklah menonjol karena ikan layang yang menjadi komoditi utama usaha pengeringan dan pengasinan itu jumlahnya sangat terbatas. Karena itu pula, jumlah penduduk Desa Bendar yang mengelola jenis usaha ini hanya beberapa orang saja. Usaha tersebut dilakukan di sebuah lapangan yang terletak di sebelah Barat desa. Kurangnya usaha pengolahan ikan inilah yang membuat tampilan Desa Bendar jauh dari gambaran sebuah desa nelayan, yaitu tidak memancarkan aroma bau amis dan tidak memperlihatkan ikan berserakan di mana-mana sebagaimana layaknya sebuah desa nelayan.

3.7.4 Usaha Pengasapan dan Pemindangan

Selain dikeringkan dan diasinkan, sebagian penduduk Desa Bendar menekuni usaha pengasapan ikan menggunakan bahan bakar dari batok kelapa dan kayu. Sebagaimana halnya usaha pengeringan dan pengasinan, usaha pengasapan ini juga tidak menonjol. Ikan yang diproses melalui pengasapan biasanya hanyalah ikan-ikan besar

seperti ikan manyung dan ikan pari atau ikan P. Para pengasap ikan tersebut adalah kaum perempuan. Kemampuan mereka dalam usaha pengasapan ikan berkisar antara 10 kg sampai 50 kg per hari. Itu pun bergantung kepada pasokan ikan.

Harga beli satu kilogram ikan manyung mentah adalah Rp8.000, sementara harga jual satu iris ikan manyung yang sudah diasap adalah Rp1.200. Satu kilogram ikan manyung mentah dapat menghasilkan 10 iris ikan asapan. Selain itu, harga beli 1 kg kepala ikan manyung mentah adalah Rp7.000, sementara harga jual setelah diasap adalah Rp15.000–Rp20.000. Sementara itu, harga beli 1 kg ikan pari mentah berkisar antara Rp6.000–Rp8.000 dengan harga jual setelah diasap Rp1.200–Rp1.500 per iris. Ikan-ikan asapan itu dijual oleh pengolanya kepada bakul di pasar Juwana sejak pukul 02.00–05.00 pagi.

Selain usaha pengasapan, terdapat pula usaha pemindangan ikan yang juga dilakukan oleh para perempuan. Jenis ikan yang dipindang biasanya adalah ikan salam, ikan tongkol dan ikan layang. Usaha pemindangan ikan hasil tangkapan nelayan Desa Bendar dikelola oleh perempuan warga Desa Bajomulyo. Di desa ini sedikitnya terdapat 11 orang pengusaha pemindangan ikan. Berbeda dengan usaha pengasapan, usaha pemindangan ikan jauh lebih rumit. Jika ikan yang akan dipindang adalah ikan-ikan beku dari *cool storage* maka ikan-ikan tersebut harus didiamkan terlebih dulu untuk menunggu ia mencair. Kemudian ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam besek bambu sebelum direbus atau dipindang dalam sebuah bak besar. Harga satu buah besek kecil adalah Rp60 dan harga satu besek yang agak besar adalah Rp250.

Sementara itu, harga beli ikan mentah mencapai Rp10.000 per kg untuk ikan salam, Rp20.000 per kg untuk ikan tongkol, dan Rp8.000–Rp10.000 per kg untuk ikan layang. Harga jual ikan hasil pindangan mencapai Rp25.000 per 2 besek yang berisi masing-masing 9 sampai 18 ekor ikan. Pengusaha pemindangan ikan sulit

menentukan nilai keuntungan karena hal ini baru dapat diketahui secara pasti setiap tutup buku yang dilakukan satu tahun sekali.

Tenaga kerja yang terlibat dalam proses pemindahan mencapai 50 orang dengan total produksi rata-rata satu ton ikan pindahan per hari. 10 orang diantaranya bertugas di bagian pemindahan. Sistem kerja mereka adalah sistem kerja berkelompok. Karena itu mereka digaji berdasarkan capaian volume pekerjaan. Mereka memperoleh gaji atau bayaran Rp40.000 untuk setiap satu *tiban* hasil pindahan seberat 120 kg.

3.8 Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan nelayan Desa Bendar yang terlihat dari tingkat kesejahteraan yang lebih baik, memang tak terbantahkan. Hampir semua rumah nelayan merupakan rumah beton permanen. Sebagian malah tergolong cukup besar dan mewah. Namun demikian, perlu dinyatakan di sini bahwa pencapaian tersebut adalah buah dari hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Selain itu penting pula diketahui bahwa aktivitas perikanan yang mereka lakukan tidak selalu berjalan dengan mudah dan menguntungkan, baik bagi ABK maupun pemilik kapal.

Pemilik kapal sendiri seringkali menghadapi banyak masalah berkaitan dengan biaya perawatan kapal, keausan bodi dan peralatan kapal, bunga pinjaman bank, pembayaran hasil penjualan ikan yang tidak tunai, risiko kapal ditangkap oleh Polairud (Polisi Air-Udara) karena berbagai tuduhan seperti kekuranglengkapan dokumen pelayaran dan kesalahan menangkap ikan di perairan yang terlarang. Pernah pula terjadi kapal mereka dibakar di perairan Kalimantan Timur karena aksi provokatif nelayan setempat yang menuduh kapal nelayan Desa Bendar yang berlabuh dan mendaratkan hasil tangkapan dianggap merusak harga pasaran ikan di pelabuhan perikanan

setempat. Semuanya itu mengakibatkan nelayan pemilik kapal mengalami kerugian yang sangat besar.⁸

Masalah bunga bank muncul setelah nelayan terpaksa berhutang ke bank melalui kredit peminjaman karena kekurangan modal usaha. Kurangnya modal usaha merupakan akibat langsung dari penjualan ikan hasil tangkapan melalui sistem perbakulan. Dalam sistem ini, bakul tidak membayar tunai pembelian ikan dari nelayan dengan dalih harus menunggu dulu pembayaran dari *user*, yaitu industri. Praktik perbakulan dalam industri perikanan tangkap di Desa Bendar sekaligus menunjukkan bahwa para bakul sendiri juga tidak memiliki modal yang kuat dalam menjalankan usaha mereka.⁹

Bakul tidak hanya terlambat membayar. Kadangkala kepastian pembayaran pun menjadi masalah. Keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran dari bakul kepada pemilik kapal membuat pemilik kapal kewalahan dalam menyediakan uang tunai untuk diberikan kepada ABK setelah proses penjualan ikan selesai. Selain itu, pemilik kapal akan kesulitan pula untuk menyediakan uang perbekalan bagi keberangkatan kapal untuk melaut bagi trip

⁸ Kasus pembakaran kapal nelayan milik H. Sariyani di pelabuhan perikanan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2006 mengakibatkan kerugian mencapai hampir Rp1 miliar, termasuk nilai ikan hasil tangkapan. Sementara itu, kasus-kasus penangkapan kapal ikan oleh aparat, baik oleh TNI Angkatan Laut yang meronda perairan laut Indonesia maupun oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) mengakibatkan pemilik kapal harus mengeluarkan uang tebusan mencapai Rp35 juta sampai Rp100 juta lebih bagi pembebasan setiap kapal dan nakhoda yang ditangkap. Nilai pembebasan delapan orang nakhoda berikut kapal mereka di perairan laut sekitar Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan belum lama ini adalah sekitar Rp35 juta bagi setiap nakhoda dan kapalnya.

⁹ Kemunculan bakul dipicu oleh fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pembeli seluruh hasil tangkapan nelayan. Fungsi TPI sekarang ini hanyalah sekadar sarana tempat pendaratan ikan dan fasilitator jasa penimbangan ikan.

berikutnya, yang biasanya hanya berselang tidak lebih dari satu minggu. Menyediakan uang tunai sebanyak Rp90 juta hingga Rp120 juta untuk belanja perbekalan sebuah kapal *cantrang*, misalnya, seperti telah diuraikan sebelumnya, bukan perkara yang mudah bagi pemilik kapal. Untuk mengatasi keadaan ini, pinjaman ke bank menjadi pilihan yang tak terelakkan oleh nelayan.

Selain dengan bank, nelayan terlibat pula dalam hubungan bisnis dengan koperasi nelayan, seperti Koperasi Serba Usaha Rukun Artha Santosa dan Koperasi Saroni Mino untuk mendapatkan modal usaha. Sebab, keharusan kapal melaut untuk trip berikutnya tidak dapat ditunda berlama-lama. Hal ini, selain tidak ekonomis, juga akan mendatangkan kerugian berantai kepada pemilik kapal. Karena itu lah pemilik kapal seakan dipaksa untuk memiliki modal usaha yang kuat dengan cara apa pun.

Kendala lain adalah regulasi perikanan tangkap yang dinilai nelayan sangat problematik dan merugikan, khususnya bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan menggunakan alat tangkap *cantrang*. Sesuai ketentuan yang berlaku hingga kini, Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) pada prinsipnya melarang kapal perikanan *cantrang* beroperasi atau dilayarkan di perairan laut Indonesia. Larangan ini dikeluarkan sejalan dengan larangan terhadap pengoperasian kapal *trawl* atau pukat harimau. Alat tangkap *cantrang* dinilai oleh DKP mempunyai sifat penangkapan dan daya rusak lingkungan yang sama dengan kapal *trawl*. Di pihak lain, para nelayan bersikukuh mengoperasikan kapal *cantrang* karena diyakini ia sama sekali berbeda dengan *trawl*. Bagi mereka, *cantrang* dipandang tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti dituduhkan pihak DKP. Para nelayan sudah berkali-kali menjelaskan bahwa operasi *cantrang* adalah operasi yang ramah lingkungan. Untuk meyakinkan pendiriannya, para nelayan telah berulang kali mengajak pihak DKP dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah untuk menyaksikan secara langsung di laut cara kerja operasi kapal *cantrang*.

Oleh karena itulah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan khusus yang membolehkan kapal *cantrang* berukuran 29 GT ke bawah beroperasi. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan nelayan. Bagaimanapun, kebijakan tersebut di mata nelayan masih belum menyelesaikan substansi persoalan. Mereka tetap bersikukuh menuntut pihak DKP mengizinkan pengoperasian kapal *cantrang* dalam berbagai ukuran. Sebab, kenyataannya kini adalah hampir semua kapal *cantrang* nelayan Desa Bendar berukuran di atas 29 GT. Apalagi pihak syahbandar pelabuhan perikanan Juwana yang mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada setiap kapal perikanan tidak pernah mempersoalkan ketidaktepatan ukuran kapal dengan alat tangkap *cantrang* yang digunakannya.

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara nelayan dan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, para nelayan Desa Bendar tetap berisiko tinggi terkena operasi penertiban di laut yang dilakukan terutama oleh Polairud. Akibat terburuk dari operasi ini adalah ditangkapnya nakhoda dan kapal-kapal *cantrang* mereka. Mengurus kembali agar kapal-kapal tersebut bisa keluar dan beroperasi lagi seperti sediakala bukanlah urusan yang ringan bagi nelayan Desa Bendar yang rata-rata berpendidikan rendah. Proses pengadilan yang melelahkan dan biaya pengurusan yang mencapai ratusan juta rupiah bagi setiap kapal yang ditangkap jelas sekali sangat mencekik dan menyengsarakan mereka.

Kendala lain yang dihadapi para nelayan, termasuk nelayan Desa Bendar, adalah lamanya waktu (mencapai dua bulan) dan berbelit-belitnya proses pengurusan izin kapal penangkap ikan¹⁰ serta

¹⁰ Surat izin penangkapan ikan dikeluarkan oleh instansi di tiga tingkatan sesuai bobot/ukuran kapal, yaitu Pemerintah Kabupaten untuk kapal dengan bobot maksimal 10 GT; Pemerintah Provinsi untuk kapal dengan bobot 11 sampai 30 GT; dan Pemerintah Pusat (DKP) untuk kapal dengan bobot di atas 30 GT. Dalam kaitan ini, Suyono, nelayan Desa Bendar yang juga mengoperasikan kapal perikanan di daerah perikanan

banyaknya jumlah surat atau dokumen yang harus mereka peroleh, yaitu lima jenis dokumen dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP): (1) Cek fisik kapal, (2) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), (3) SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),¹¹ (4) SLO/Surat Laik Operasi (pengawas perikanan), dan (5) Surat Andon,¹² serta 11 surat dari instansi lain, yaitu: (1) Pas Tahunan (dari Syahbandar), (2) Surat Ukur (Syahbandar), (3) Gros Akte (Syahbandar), (4) Surat Laik Laut (dari Syahbandar), (5) SIB/Surat Izin Berlayar (Syahbandar), (6) Surat Radio (Departemen Informasi dan Komunikasi), (7) Surat Kesehatan (Departemen Kesehatan), (8) Buku Daftar ABK, (9) Sijil Kapal/Perjanjian Kerja, (10) ANKAPIN/(Departemen Perhubungan), dan (11) ATKAPIN/(Departemen Perhubungan).

Masih tertekan dengan regulasi yang memberatkan itu, nelayan akan semakin sulit bergerak lantaran ada indikasi DKP akan

Rembang, dalam percakapan telepon tanggal 7 Desember 2009 mengungkapkan kembali kekecewaannya terhadap pemerintah (DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan) dan aparat Polairud yang tidak peduli dengan nasib nelayan. Ia menganggap tindakan Polairud menangkap kapal dan nakhoda perikanan karena tuduhan melanggar izin wilayah tangkap sebagai tindakan semena-mena yang menjadikan nelayan yang bodoh dan tidak berdaya itu sebagai sasaran pemerasan. Seharusnya izin menangkap ikan di WPP bagian Barat, misalnya, tidak dipersoalkan oleh aparat di WPP bagian Timur dan sebaliknya, karena WPP tersebut berlaku bagi kedua wilayah, yaitu Barat dan Timur. WPP Barat meliputi Selat Sunda sampai Laut Jawa, dan Laut Cina Selatan, sementara WPP Timur meliputi Selat Karimata di Kalimantan sampai ke perairan Laut Makassar.

¹¹ Berkaitan dengan SIPI, nelayan Desa Bendar merasa dibatasi ruang gerak operasinya karena izin yang dikeluarkan berlaku untuk dua Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) saja. Dengan demikian, kapal perikanan mereka tidak dapat turut serta beroperasi di seluruh perairan Laut Indonesia yang luas dan kaya dengan sumberdaya perikanan.

¹² Surat Andon adalah surat yang menyatakan kapal perikanan boleh mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang bukan merupakan pelabuhan asal pendaftaran.

mengeluarkan regulasi baru yang melarang semua kapal perikanan menjual hasil tangkapan mereka di tengah laut. Pelarangan tersebut jelas terbaca dari isi kandungan Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DKP Nomor: 2442/DPT.4/PI.420.D4/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009.

Dampak dari regulasi yang akan digulirkan ini sungguh hebat. *Pertama*, pemilik kapal akan kesulitan mendapatkan sebagian uang tunai hasil dari penjualan ikan di laut yang dapat ia gunakan untuk membayar jasa ABK. *Kedua*, pelarangan penjualan ikan di laut akan membuat biaya operasional aktivitas penangkapan ikan meningkat tinggi guna menyediakan es dalam jumlah yang lebih banyak untuk membuat ikan-ikan hasil tangkapan tetap segar dan bermutu baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Secara umum kebijakan pemerintah daerah belum banyak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan. Kebijakan pemberdayaan nelayan yang ada saat ini lebih banyak pada penyuluhan, yang oleh masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Memang ada beberapa kebijakan berupa pemberian bantuan peralatan tangkap, namun jumlahnya tidak banyak, sehingga jauh dari kebutuhan masyarakat.

4.1 Penyuluhan Masyarakat

Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, dan untuk membuat agar nelayan dapat hidup mandiri. Pemberdayaan itu diperlukan terutama karena didasarkan pada asumsi bahwa suatu masyarakat sedang dalam kondisi tidak berdaya atau kurang berdaya. Adapun secara sosiologis keadaan kurang berdaya itu diidentikkan dengan keadaan keterbelakangan. Dalam hal ini keterbelakangan itu bisa bermakna ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek yang lain. Karena itu istilah pemberdayaan menjadi identik dengan *community development*.

Dalam perspektif modernisasi, Harrod dan Domar melihat bahwa keterbelakangan adalah suatu gejala yang disebabkan oleh faktor kekurangan modal. Dengan demikian masalah pemberdayaan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Karena itulah maka untuk memberdayakan masyarakat, satu cara yang dianggap penting untuk dilakukan adalah mencari tambahan modal untuk investasi. Dengan adanya modal yang diinvestasikan, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Hal ini karena

menurutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan rendah (Arief Budiman, 1996:19).

Todaro (1983) menunjukkan adanya tiga sasaran yang mesti dicapai dalam pembangunan, sehingga berdasarkan tiga hal itulah maka pemberdayaan juga mesti dilakukan. Adapun tiga hal itu adalah:

- (a) Meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan
- (b) Mengangkat taraf hidup, termasuk meningkatkan penghasilan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga untuk mengangkat kesadaran terhadap harga diri baik individual maupun kolektif.
- (c) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

McClelland (1971) melihat keterbelakangan suatu masyarakat dari ketiadaan motif berprestasi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*) itu dianggap suatu hal yang penting bagi Clelland, karena dengan kebutuhan seperti itu maka masyarakat akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi, akan bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan material, melainkan lebih pada untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Karena itu jika dalam masyarakat banyak orang yang memiliki *need for achievement* yang tinggi, yang selanjutnya disebut n-Ach, maka diharapkan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Karena itu dalam perspektif Clelland, pemberdayaan

masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan n-Ach yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini karena n-Ach itu bukan sesuatu yang diwariskan sejak lahir, melainkan semacam virus yang dapat ditularkan.

Dalam perspektif teori kebutuhan pokok (*basic needs theory*), keterbelakangan terjadi karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu pemberdayaan berarti suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. ILO (*International Labour Organization*) menggolongkan kebutuhan pokok manusia (*human basic needs*) menjadi dua kategori, yaitu: (1) Kebutuhan yang diperlukan bagi suatu keluarga untuk dapat memenuhi tingkat hidup yang minimum, seperti sandang, pangan dan perumahan, dan (2) Kebutuhan yang berkaitan dengan prasarana umum yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan seluruh warga, yang antara lain meliputi sarana transportasi, air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan (Sjahrir, 1986:39).

Dari beberapa pendekatan di atas maka pemberdayaan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, melainkan juga dengan hal-hal lain yang bersifat non ekonomi. Dalam hal ini Collins menyebut beberapa hal yang diperlukan dalam pembangunan non ekonomi, khususnya sosial budaya, yaitu mulai dari pemberian pelayanan sosial sampai pada aspek-aspek yang lebih mendasar, seperti memperkuat struktur sosial dan ikatan keluarga, serta mengembangkan sikap percaya diri sendiri (Moeljarto, 1986:112).

Melihat pada berbagai pendekatan di atas, maka dalam pemberdayaan semua aspek perlu mendapatkan perhatian, mulai dari masalah permodalan untuk investasi, perubahan mentalitas, penyediaan prasarana kebutuhan pokok, penataan hubungan antar struktur sosial yang ada, sampai pada pembentukan/penguatan kelembagaan sosial. Prinsip-prinsip pemberdayaan di atas adalah prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan. Meskipun demikian, teknis pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga bentuk dan cara pemberdayaan yang

dilakukan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat yang akan diberdayakan.

Dengan maksud untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, Pemerintah Kabupaten Pati memiliki beberapa program untuk memberdayakan nelayan, yang dapat dibedakan menjadi beberapa program, antara lain: program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, program pengembangan budidaya perikanan, dan program pengembangan perikanan tangkap. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dibedakan menjadi dua program, yaitu: temu usaha dan kemitraan pelaku usaha perikanan, dan fasilitasi unit pelayanan pengembangan. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan ada tiga kegiatan, yaitu: pengawasan dan pengendalian alat tangkap, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa nelayan, dan fasilitasi forum koordinasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Program pengembangan budidaya perikanan dibedakan menjadi beberapa program, antara lain: pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan, penyelenggaraan balai benih ikan, pembinaan manajemen tempat pelelangan ikan. Adapun dalam program pengembangan perikanan tangkap kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pembinaan nelayan dan fasilitasi pengembangan alat tangkap ikan.

Tabel 4.1 Beberapa Program Pemberdayaan Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No	Jenis program	Kegiatan
1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Temu usaha dan kemitraan pelaku usaha perikanan • Fasilitasi unit pelayanan pengembangan

2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian alat tangkap • Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa nelayan • Fasilitasi forum koordinasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
3	Pengembangan budidaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bibit ikan unggul • Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan • Pembinaan dan pengembangan perikanan • Penyelenggaraan balai benih ikan • Pembinaan manajemen tempat pelelangan ikan
4	Pengembangan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan nelayan • Fasilitasi pengembangan alat tangkap ikan
5	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air kolam	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pelestarian ekosistem mangrove • Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tambak

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program-program tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk penyuluhan ke masyarakat. Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati, kegiatan penyuluhan itu merupakan upaya untuk mengubah perilaku masyarakat nelayan (termasuk pembudidaya) untuk memahami, menerima dan mampu menerapkan inovasi teknologi yang lebih positif, sehingga ada peningkatan produksi perikanan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tujuan penyuluhan adalah untuk membina dan mengembangkan kemampuan gerak dan daya pikir nelayan sebagai pelaku pembangunan perikanan. Dengan demikian menurut pandangan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten, kegiatan penyuluhan itu merupakan bagian dari kegiatan yang strategis.

Beberapa langkah dilakukan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, antara lain:

- (a) Meningkatkan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan melalui kegiatan:
 - Mengirim pelatihan bagi petani nelayan termasuk keluarganya
 - Melakukan evaluasi terhadap kelas kelompok pembudidaya ikan dan nelayan
 - Menyelenggarakan lomba dinamika kelompok tani nelayan dan kelompok wanita nelayan
- (b) Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh dan petugas teknis perikanan, melalui kegiatan:
 - Mengirimkan petugas untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BLPP, BKPI dan UPT pusat lainnya
 - Menyelenggarakan pelatihan bagipara penyuluh dan petugas teknis perikanan secara rutin
 - Menyusun program penyuluhan bagi PPL
- (c) Meningkatkan pembinaan kelompok tani nelayan termasuk wanita dan tarunanya
- (d) Melengkapi materi penyuluhan dengan brosur, leaflet, poster, majalah perikanan, media elektronik dan penyelenggaraan pameran
- (e) Meningkatkan kampanye makan ikan kepada masyarakat melalui organisasi wanita dan sekolah

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten itu ditanggapi secara sinis oleh para nelayan, karena dianggap tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Adapun fasilitasi pengembangan alat tangkap, walaupun itu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan tangkap, namun jumlahnya dirasakan terlalu sedikit, sehingga tidak bisa dinikmati oleh para nelayan.

4.2 Bantuan Peralatan Tangkap

Di Desa Bendar, bantuan alat tangkap itu diberikan melalui kelompok nelayan tradisional, dan kemudian oleh kelompok bantuan alat tangkap itu diberikan kepada anggota yang belum memiliki alat tangkap. Menurut pengakuan ketua kelompok nelayan tradisional di Desa Bendar, dalam 5 tahun terakhir nelayan Desa Bendar sudah beberapa kali mendapatkan bantuan peralatan tangkap perikanan, baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati ataupun dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah berupa berupa *gill net* (jaring insang) sebanyak 40 unit yang diserahkan pada tahun 2006, dan *trammel net* (jaring udang) sebanyak 33 unit pada tahun 2007. Adapun bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa bubu 2500 unit dan cold box sebanyak 15 unit pada tahun 2005, jaring kembang sebanyak 20 unit dan *mbleng* (tempat ikan) sebanyak 60 unit pada tahun 2007, satu set kunci perbengkelan pada tahun 2008, dan 6 set kunci perbengkelan pada tahun 2009. Semua bantuan itu diberikan dalam bentuk barang, yang diberikan langsung kepada nelayan melalui ketua kelompok nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Amanat (*Amrih Mulyane Anggota Nelayan Tradisional*).

Paguyuban Amanat sendiri merupakan himpulan nelayan yang anggotanya meliputi nelayan dari empat kecamatan yang terdiri dari 10 desa, dan saat ini anggotanya berjumlah 297 nelayan. Adapun desa-desa dan kecamatan yang anggotanya tergabung dalam Paguyuban Amanat adalah: (1) Desa Bendar, (2) Desa Trimulyo, (3) Desa Doropayung, (4) Desa Kedungpancing, (5) Desa Pekuwon, (6) Desa Bumirejo (Kecamatan Juwana), (7) Desa Bungas Rejo (Kecamatan Jakenan), (8) Desa Kluwuk (Kecamatan Wedari Jaksa) dan (9) Desa Tunjungrejo dan (10) Desa Cebulek (Kecamatan Margoyoso). Oleh karena itu dalam prakteknya, bantuan itu tidak seluruhnya diterima oleh nelayan Desa Bendar, tetapi juga oleh nelayan dari desa lain.

Tabel 4.2 Bantuan Peralatan Perikanan Kepada Nelayan Melalui Paguyuban Amanat

No.	Tahun	Jenis Bantuan	Pemberi Bantuan
1.	2005	<ul style="list-style-type: none"> • Bubu 2500 unit • Cold box 15 unit 	Dinas Perikanan Kabupaten Pati
2.	2006	<ul style="list-style-type: none"> • Gill net (jaring insang) 40 unit. 	Dinas Perikanan Kabupaten Pati
3.	2007	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trammel net</i> (jaring udang) 33 unit 	Dinas Perikanan Kabupaten Pati
4.	2007	<ul style="list-style-type: none"> • Jaring kembang 20 unit • <i>Mbleng</i> (tempat ikan) 60 unit. 	Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah
5.	2008	<ul style="list-style-type: none"> • Kunci-kunci perbengkelan, 1 set 	Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah
6.	2009	<ul style="list-style-type: none"> • Kunci-kunci perbengkelan, 6 set 	Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Wawancara dengan Ketua Paguyuban Amanat

Mengingat banyaknya anggota paguyuban, dan sedikitnya jumlah bantuan yang diperoleh, maka untuk menghindari terjadinya kecemburuan antar anggota kelompok nelayan, bantuan yang sudah diterima dari dinas tersebut oleh paguyuban kemudian diundi untuk menentukan orang yang berhak memperoleh bantuan. Mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, paguyuban memberitahukan kepada anggota kelompok yang ada di setiap desa bahwa akan ada bantuan untuk kegiatan perikanan. *Kedua*, bagi anggota paguyuban yang berminat, diminta untuk mendaftarkan diri ke ketua paguyuban. *Ketiga*, ketua paguyuban melakukan undian dari seluruh anggota yang sudah mendaftarkan diri, dan yang namanya keluar dalam undian itulah yang ditentukan sebagai penerima bantuan. Pelaksanaan undian dilakukan dengan dihadiri wakil-wakil dari nelayan dari setiap desa yang menjadi anggota paguyuban.

Walaupun bantuan yang diberikan oleh dinas itu berupa hibah kepada nelayan, namun melalui kesepakatan di antara anggota paguyuban, peralatan bantuan itu tidak diberikan kepada anggotanya secara gratis. Kepada setiap anggota paguyuban diminta untuk mengangsur, dan pada saat menerima peralatan bantuan itu diharuskan membayar uang muka. Dana yang berasal dari uang muka dan uang angsuran itu oleh paguyuban dikumpulkan, untuk dibelikan peralatan baru yang akan digulirkan kepada nelayan lain yang belum menerima. Dengan demikian walaupun bantuan itu dari dinas berupa hibah, namun oleh paguyuban bantuan itu diberikan kepada nelayan dalam bentuk kredit bergulir. Hal itu dilakukan selain untuk menghindari kecemburuan di antara nelayan, juga untuk mempercepat proses penerimaan bantuan oleh para nelayan.

Sebagai contoh model pengguliran bantuan peralatan adalah sebagai berikut. Bantuan jaring kembang yang berupa hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan, maka kepada nelayan yang mendaftar dan memenangkan undian, mereka diharuskan membayar uang muka sebesar Rp500.000,- untuk bisa memiliki jaring itu. Oleh karena harga kontan jaring itu sebesar Rp2.500.000,-, maka sisanya sebesar Rp2.000.000,- harus diangsur setiap minggu selama empat tahun, dengan jumlah angsuran sebesar Rp20.000,- per minggu. Dengan cara demikian maka sexara berangsur sebagian besar nelayan bisa memiliki jaring kembang.

Dengan demikian, keberadaan Paguyuban Amanat tersebut bukan hanya sekedar untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada anggotanya, melainkan juga sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberdayakan dirinya, melalui kelompok. Untuk keperluan tersebut, maka paguyuban juga melakukan rapat rutin tiga bulan sekali, yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa yang menjadi anggotanya. Adapun yang dibahas dalam rapat itu selain berkaitan dengan bantuan adalah: masalah pencemaran laut, masalah yang terkait dengan peralatan tangkap yang dilarang untuk dioperasikan di jalur I, dan masalah pelestarian tempat ikan seperti penanaman bakau.

Untuk memberdayakan anggotanya, Paguyuban Amanat sendiri memiliki beberapa seksi, yaitu: seksi kemasyarakatan nelayan (yaitu berupa humas yang menjalin hubungan antar nelayan), seksi sosial (yang bertugas mengurus bantuan-bantuan sosial, seperti: bantuan kenelayanan, bantuan untuk anggota yang sakit, yaitu sebanyak Rp150.000,- bagi yang dirawat dan Rp300.000,- bagi yang meninggal, dan Rp100.000,- bagi yang mengalami kecelakaan laut), seksi pengolahan dan produksi (antara lain dengan membeli hasil tangkapan nelayan), dan seksi agama (yaitu menyelenggarakan pengajian untuk istri-istri nelayan). Pada saat ini paguyuban juga sedang merintis usaha penggemukan sapi, dengan modal sebesar Rp15.000.000,-.

Selain kegiatan rutin, beberapa kegiatan lain juga dilakukan oleh paguyuban, antara lain:

- (1) Pelatihan perbengkelan mesin dan las kapal di BBPPI Semarang
- (2) Pelatihan alat komunikasi kapal
- (3) Sosialisasi jaring kembang di DPC HNSI
- (4) Penanaman bakau
- (5) Melaporkan ke DKP jika ada *cantrang* yang melaut di jalur I.

Untuk kelangsungan hidup paguyuban, dan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka kepada setiap anggota diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp5.000,-, dan simpanan wajib sebesar Rp10.000,- per tahun.

4.3 Kebijakan Perijinan

Selain bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan provinsi Jawa Tengah, pemberdayaan nelayan di daerah ini juga dilakukan melalui kebijakan perijinan. Terkait dengan pengoperasian *cantrang* misalnya, pada asalnya pemerintah melarang pengoperasian *cantrang*, karena alat ini dianggap sama dengan *trawl*, yaitu merupakan pukat hela yang dianggap merusak lingkungan. Jadi termasuk dalam kategori peralatan tangkap yang dilarang oleh pemerintah, berdasarkan Keppres No. 39/1980. Akan tetapi,

mengingat banyak nelayan di wilayah Bendar khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang menggunakan *cantrang*, serta adanya demonstrasi yang dilakukan oleh para nelayan *cantrang* di seluruh kawasan Pantura, maka oleh pemerintah provinsi Jawa tengah akhirnya *cantrang* diberi ijin untuk dioperasikan, tetapi dalam ijin tidak disebutkan dengan nama *cantrang*, melainkan dengan nama pursein.

Dalam demonstrasi tersebut sebetulnya nelayan *cantrang* minta dipertemukan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk menjelaskan bahwa *cantrang* berbeda dengan *trawl*, namun hanya bisa dipertemukan dengan Dirjen Perikanan Tangkap. Menurut nelayan perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

- (1) Pengoperasian jaring *trawl* ditarik sambil kapal berjalan, sedangkan dalam pengoperasian *cantrang*, jaring ditarik dengan posisi kapal tidak berjalan.
- (2) Jaring *trawl* jika ditarik tetap terbuka, sedangkan jaring *cantrang* jika ditarik akan melipat.
- (3) *Trawl* untuk menangkap udang dan berbagai jenis ikan, *cantrang* hanya untuk menangkap ikan. Udang tidak bisa tertangkap dengan *cantrang*, karena kecepatannya kurang.
- (4) *Trawl* bisa dioperasikan di jalur I, sedangkan *cantrang* hanya bisa dioperasikan di jalur tiga ke atas. *Cantrang* tidak bisa dioperasikan di jalur I dan II karena terlalu dangkal.
- (5) *Trawl* bisa dioperasikan siang dan malam hari, *cantrang* hanya dioperasikan siang hari.

Oleh karena ijin pengoperasian *cantrang* itu hanya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka agar nelayan *cantrang* bisa memperoleh ijin dari pemerintah provinsi, maka dalam pengajuan ijin nelayan harus mencantumkan kapasitas kapal di bawah 30 GT. Padahal, dalam realitas *cantrang* yang dimiliki oleh nelayan Bendar itu umumnya memiliki kapasitas di atas 30 GT, bahkan ada yang sampai 80 GT. Kedua, oleh karena secara umum *trawl* itu dinyatakan dilarang, dan *cantrang* dianggap tidak berbeda dengan *trawl*, maka

dalam pengajuan ijin harus diajukan dengan nama bukan *cantrang*, sehingga akhirnya banyak yang menggunakan nama purse seine.

Kenyataan seperti itu membawa permasalahan tersendiri bagi nelayan *cantrang*, karena rawan dengan penangkapan di tengah laut. Hal itu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, walaupun sudah mengantongi ijin, namun jika mereka melaut sampai di wilayah ZEE, maka mereka dianggap melanggar, karena ijin yang dikeluarkan oleh provinsi hanyalah untuk penangkapan di kawasan perairan sejauh 12 mil, yang merupakan kawasan provinsi. Padahal, menurut nelayan *cantrang*, penangkapan yang dilakukan selama ini umumnya jauh di luar 12 mil, karena di kawasan perairan 12 mil dianggap kurang ikannya. *Kedua*, ijin yang diperoleh adalah untuk *purseine* atau dengan nama lain, tetapi bukan untuk *cantrang*. Hal itu tentu berbeda dengan realitas yang sebenarnya, karena alat tangkap yang digunakan sebetulnya adalah *cantrang*. Kondisi seperti itulah yang mengakibatkan nelayan *cantrang* tetap mengalami keresahan, karena jika tertangkap, biaya untuk membebaskannya tidak cukup hanya puluhan juta rupiah, melainkan sampai ratusan juta rupiah. Selain itu, kondisi tersebut juga rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemerasan terhadap nelayan *cantrang*.

Pemberdayaan lain melalui kebijakan perijinan adalah pengeluaran ijin oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap *purseine* dengan bobot di atas 30 GT, walaupun semestinya proses pemberian ijin kapal dengan bobot di atas 30 GT itu harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemberian ijin oleh pemerintah provinsi itu dirasakan meringankan beban nelayan, karena mereka tidak harus mengurus ke Jakarta, yang tentunya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Hal itu diakui oleh beberapa nelayan. Beberapa nelayan pursein mengakui bahwa kapal mereka bobotnya di atas 30 GT, bahkan mencapai 80 GT. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dengan cara menyebutkan kapasitas kapal hanya 29 GT. Dengan cara itulah maka banyak kapal

milik nelayan Bendar yang tidak perlu mengurus ijin usahanya ke pusat.

Walaupun hal tersebut dirasakan sangat membantu nelayan, namun bukan tanpa masalah. Permasalahan utama adalah mereka tidak hanya melaut di wilayah 12 mil sebagaimana ijin yang diberikan provinsi, tetapi sampai dengan wilayah ZEE. Hal itu karena menurut mereka kalau hanya mengandalkan kawasan perairan sejauh 12 mil, maka ikan yang bisa diperoleh akan sangat tidak memadai.

Oleh karena ijin yang dikeluarkan oleh provinsi hanya berlaku di kawasan perairan sejauh 12 mil yang menjadi wilayah provinsi Jawa tengah, maka pengoperasian di luar itu berarti dianggap sebagai pelanggaran. Begitu pula dengan bobot kapal yang tercantum dalam ijin yang di bawah 30 GT, padahal realitasnya kapal yang digunakan di atas 30 GT, maka hal itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran oleh petugas. Kondisi seperti itulah yang mengakibatkan kondisi nelayan menjadi rawan dalam beroperasi di tengah laut. Tidak jarang nelayan menjadi ajang pemerasan dari oknum petugas. Menurut beberapa nelayan, pemerasan itu bukan hanya dalam nilai ratus ribu rupiah, melainkan sampai dengan puluhan juta rupiah. Nelayan terpaksa memberi, karena diancam akan ditangkap, terkait dengan pelanggaran wilayah operasi. Mengingat ancaman hukuman atau dendanya sangat besar, selain urusan yang berlarut-larut, maka walaupun terpaksa nelayan umumnya lebih memilih untuk memberikan uang kepada oknum petugas, walaupun jumlahnya sangat besar. Selain itu, kalau tertangkap dan diproses, biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan kapal juga sangat besar, bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Terkait dengan masalah perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, pada prinsipnya ijin penangkapan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten adalah untuk kapal dengan bobot kurang dari 10 GT. Hal itu karena 10 sampai 29 GT perijinannya dikeluarkan oleh provinsi, dan 30 GT ke atas perijinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan diberikannya wewenang

kepada pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan ijin bagi kapal bertonase 10 GT ke bawah, maka diharapkan dapat mempermudah bagi nelayan kecil untuk mengurus perijinannya.

Kebijakan proses perijinan di kabupaten untuk nelayan dengan kapal kurang dari 10 GT itu dirasakan sangat membantu bagi nelayan. Meskipun demikian, mereka mengharapkan untuk kapal dengan bobot di atas 30 GT perijinannya juga bisa dilakukan di tingkat provinsi, agar mempercepat proses perijinan.

Dalam kaitannya dengan perijinan, kebijakan pemerintah adalah untuk kapal sampai dengan 10 GT proses perijinan dilakukan di kabupaten, di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dilakukan di provinsi, dan di atas 30 GT dilakukan di pusat. Khusus proses perijinan untuk kapal di atas 30 GT itu oleh masyarakat dianggap kurang mendukung kepentingan mereka, karena selain lokasi pengurusan ijin yang jauh dari tempat tinggal mereka, waktu yang dibutuhkan juga lama. Bagi masyarakat, untuk ijin pengoperasian kapal yang baru memang wajar jika perijinannya harus diproses di pusat. Akan tetapi, untuk perpanjangan ijin, karena provinsi itu merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan otonomi daerah, maka mereka mengusulkan agar prosesnya bisa dilakukan di provinsi. Dengan demikian ada efisiensi dalam pengurusan perijinan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga diharapkan bisa lebih cepat.

4.4 Pembangunan TPI

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan nelayan adalah melalui pembangunan dua TPI di wilayah Juwana, yaitu TPI Bajo Mulyo I dan TPI Bajo Mulyo II. Perbedaan kedua TPI adalah TPI Bajo Mulyo I khusus untuk penjualan ikan hasil penangkapan menggunakan *cantrang*, sedangkan TPI II penjualan ikan hasil tangkapan selain *cantrang*, termasuk *purse seine*.

Keberadaan TPI itu terutama dimaksudkan untuk dua hal. *Pertama*, dengan adanya TPI maka masyarakat dapat menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI, dengan sistem lelang. Dengan demikian diharapkan agar nilai jual hasil tangkapan menjadi lebih tinggi, karena ikan hanya dijual kepada pembeli yang melakukan penawaran tertinggi. *Kedua*, dengan adanya TPI, maka memudahkan Pemerintah Daerah untuk menarik retribusi, baik dari nelayan selaku penjual hasil tangkapan, maupun dari pedagang yang membeli hasil tangkapan.

Walaupun tujuan dibentuknya TPI sangat ideal, namun dalam kenyataan jauh dari harapan. Yang ada hanyalah pembelian ikan oleh para bakul secara langsung dari kapal-kapal ikan yang merapat, tanpa ada proses lelang. Oleh karena itu dari dua fungsi yang ada, hanya satu fungsi yang berjalan, yaitu penarikan retribusi. Sedangkan fungsi lelang tidak berjalan, walaupun praktek jual beli ikan tetap dilakukan di TPI. Karena itu keberadaan TPI cenderung lebih berfungsi sebagai pasar ikan.

Dengan berfungsinya TPI hanya sebagai pasar ikan, maka harapan terkontrolnya harga ikan dalam penjualan melalui TPI tidak dapat terwujud. Meskipun demikian, walaupun hanya sekedar sebagai pasar ikan, namun pemungutan retribusi tetap dilakukan. Hal ini tentu saja merugikan nelayan, karena pendapatan riil yang diterima bisa menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya, karena masih harus dipotong dengan biaya retribusi.

Kerugian nelayan itu menjadi lebih besar, karena ternyata retribusi yang seharusnya dibayar oleh penjual dan pembeli, ternyata hanya dibebankan kepada penjual (nelayan). Dengan demikian, maka apa yang disebut retribusi itu belum memihak pada kepentingan nelayan, bahkan nelayan cenderung dirugikan. Sementara yang diuntungkan dengan praktek tersebut adalah para pembeli, yang pada umumnya mereka adalah para pedagang ikan.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nelayan, upaya peningkatan kesejahteraan melalui TPI itu

tidak terwujud. Meskipun demikian, dengan adanya TPI nelayan merasa diuntungkan, karena pemasaran ikan menjadi lebih mudah. Nelayan tidak perlu repot memikirkan penjualan hasil tangkapan, karena di TPI pedagang ikan dari berbagai daerah dan dari berbagai perusahaan pengolah ikan sudah siap menampung.

Walaupun di TPI ikan akan terjual berapapun banyaknya, namun nelayan tetap menghadapi permasalahan, karena pembelian ikan oleh para bakul itu biasanya tidak dilakukan secara kontan. Biasanya bakul hanya membayar ikan sebagian, sedangkan sebagian yang lain baru dibayar beberapa hari bahkan beberapa minggu kemudian. Kenyataan tersebut tentunya menyulitkan nelayan, karena nelayan sangat membutuhkan uang untuk keperluan biaya operasional.

Yang jelas diuntungkan dengan keberadaan TPI adalah pemerintah daerah, melalui pemasukan retribusi dari para nelayan. Besarnya retribusi adalah sebesar 5% dari nilai ikan yang dijualnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, 5% itu tidak dihitung dari nilai penjualan secara riil, tetapi dari perhitungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu satu kapal diperhitungkan mendapatkan hasil Rp15 juta, walaupun secara riil ikan yang dijual dari nelayan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan patokan hasil sebesar itu, maka berapapun jumlah ikan yang dijual oleh nelayan, jumlah retribusinya adalah Rp15 juta x 5%, atau sama dengan Rp750.000,- per kapal.

4.5 Kebijakan Lain

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten atau provinsi adalah mengacu dari pusat, yaitu antara lain terkait dengan penerapan aturan tentang zonasi wilayah penangkapan dan tentang perijinan. Aturan tentang zonasi wilayah tangkap didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99, yang membagi wilayah tangkap perikanan laut menjadi tiga jalur, yaitu:

- (a) Jalur penangkapan satu, meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan enam mil laut. Jalur penangkapan satu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - (1) Perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan tiga mil laut.
 - (2) Perairan pantai di luar tiga mil laut sampai dengan enam mil laut.
- (b) Jalur penangkapan dua, meliputi jalur penangkapan di luar jalur satu sampai dengan 12 mil ke arah laut.
- (c) Jalur penangkapan tiga, meliputi perairan di luar jalur dua sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tabel 4.3 Pembagian Jalur Wilayah Penangkapan Perikanan Laut

No.	Jalur	Wilayah
1	IA	Sampai dengan 3 mil laut
2	IB	> 3 mil sampai dengan 6 mil laut
3	II	> 6 mil sampai dengan 12 mil
4	III	> 12 mil sampai dengan ZEE

Tujuan dari penerapan jalur wilayah penangkapan itu selain untuk melindungi sumberdaya yang ada di perairan pantai dari tangkap lebih (*over eksploitasi*), juga untuk melindungi nelayan tradisional dari persaingan yang tidakimbang dalam memperebutkan sumberdaya. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka diharapkan nelayan tradisional dapat mengoptimalkan penangkapan di jalur 1.

Berkaitan dengan pembagian jalur penangkapan tersebut, beberapa alat tangkap hanya dibolehkan untuk dioperasikan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Di jalur penangkapan IA (dengan jarak sampai dengan tiga mil laut) misalnya, alat tangkap/perahu yang boleh dioperasikan hanya yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat menetap, (2) Tidak bersifat menetap tetapi tidak dimodifikasi, dan (3) Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter. Dengan demikian alat tangkap/perahu yang

tidak memenuhi kriteria tersebut dilarang dioperasikan di jalur satu, yaitu meliputi:

- (a) Kapal perikanan bermesin dalam berukuran diatas 5 GT, atau kapal perikanan bermesin di atas 10 PK;
- (b) Semua jenis jaring *trawl* (*beam trawl*, *otter trawl* dan *pair trawl*, *otter bord*);
- (c) Jaring/pukat cincin/keler/langgar dan sejenisnya (*purse seine*);
- (d) Jaring/pukat lingkaran (*oncerolling gillnet*) dan jaring (pukat hanyut tongkol (*drift gillnet*);
- (e) Jaring/pukat payang/*dogol/cantrang/lampera/banting* di atas 120 meter panjang rentangan dari ujung sayap/kaki yang satu ke ujung yang lain.

Di jalur penangkapan IB alat tangkap/perahu yang boleh dioperasikan hanya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
- (b) Kapal perikanan, yang meliputi:
 - Perahu tanpa motor/bermotor-tempel dengan panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter
 - Kapal bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 m, atau berukuran maksimal 5 GT
 - Pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 150 m;
 - Jaring insang hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1000 m

Adanya kriteria tersebut maka alat tangkap dan kapal perikanan yang tidak memenuhi kriteria itu dilarang beroperasi di jalur IB, yaitu:

- (a) Kapal perikanan bermesin dengan kapasitas di atas 25 GT, atau kapal perikanan dengan kekuatan mesin di atas 50 PK
- (b) Jaring *trawl* dasar berpanel (*otter board*) yang panjang tali ris atas/bawah di atas 12 meter.
- (c) Jaring *trawl* melayang (*pelahin trawl*) dan *pair trawl/jaring trawl* yang ditarik dua kapal.

- (d) Jaring cincin/keler/langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 300 meter.

Pada jalur penangkapan dua, beberapa kriteria alat tangkap/perahu (kapal) yang boleh dioperasikan meliputi:

- (a) Kapal perikanan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT;
- (b) Kapal perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan sebagai berikut:
- Pukat (*purse seine*) dengan panjang maksimal 600 m, dan cara pengoperasiannya menggunakan satu kapal, atau panjang maksimal 1000 m dengan cara pengoperasian menggunakan dua kapal yang bukan grup;
 - Tuna *long line* (pancing tuna) dengan jumlah patapancing maksimal sebanyak 1200 mata pancing;
 - Jaring insang hanyut (*drift gill net*) dengan panjang maksimal 2500 m.

Berkaitan dengan itu, beberapa alat tangkap dan kapal perikanan yang tidak memenuhi kriteria tersebut juga dilarang dioperasikan di jalur dua, meliputi:

- (a) Kapal perikanan bermesin dengan kapasitas di atas 100 GT, atau kapal perikanan dengan kekuatan mesin di atas 200 PK;
- (b) Jaring *trawl* dasar berpanel (*otter board*) yang panjang tali ris atas/bawah di atas 20 meter;
- (c) *Pair (bull) trawl*;
- (d) Jaring cincin/keler/langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 600 meter

Adapun pada jalur penangkapan tiga kriteria alat tangkap/kapal yang boleh dioperasikan adalah:

- (a) Semua kapal perikanan berbendera Indonesia;
- (b) Kapal berukuran maksimal 200 GT (kecuali yang menggunakan alat penangkap ikan *purse seine* pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores Dan Laut Saw);

- (c) Perairan ZEE I Selat Malaka diperbolehkan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 2000 GT, kecuali menggunakan alat penangkap ikan pukat ikan (*fish net*) dengan ukuran minimal 60 GT.

Khusus perairan ZEE I dan di luar ZEE I Selat Malaka, kriteria alat tangkap/kapal yang boleh dioperasikan meliputi:

- (a) Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera asing, berukuran maksimal 350 GT, untuk semua alat tangkap ikan.
- (b) Kapal perikanan berukuran di atas 350 GT-8000 GT yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine*, hanya boleh beroperasi di luar 100 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (c) Kapal perikanan dengan alat penangkap ikan *purse seine* dengan sistem group hanya diperbolehkan di luar 100 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (d) Kapal perikanan berbendera asing boleh dioperasikan pada jalur penangkapan III, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah perairan laut dengan jarak di atas 12 mil adalah milik pemerintah pusat, sampai dengan 12 mil milik pemerintah provinsi, dan sepertiga dari wilayah provinsi, atau maksimal empat mil merupakan milik pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, wilayah pemerintah kabupaten/kota hanya meliputi wilayah perairan yang termasuk dalam kategori jalur penangkapan satu, dan sedikit masuk dalam jalur penangkapan dua. Karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemda TK I Kabupaten Pati hanya meliputi wilayah laut yang termasuk dalam kategori jalur satu dan sedikit jalur dua tersebut. Hal itu berbeda dengan kewenangan pemerintah provinsi yang meliputi semua jalur dua. Adapun kewenangan pemerintah pusat meliputi seluruh jalur tiga, yaitu berurusan dengan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional. Karena itu pengelolaan dan pengawasan terhadap operasionalisasi alat

tangkap/perahu yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pati hanya terkait dengan jalur satu dan (sedikit) jalur dua.

Walaupun untuk melindungi nelayan tradisional sistem pembagian jalur telah dilakukan, namun dalam prakteknya, pengawasan penggunaan peralatan tangkap di jalur satu dan dua itu sulit dilakukan oleh Pemerintah kabupaten. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya batas yang jelas di laut yang memisahkan antara jalur satu, dua dan seterusnya. Karena itu pelanggaran ketentuan jalur penangkapan sulit dideteksi, kecuali pelanggaran itu sudah masuk lebih dalam ke jalur satu.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kehidupan nelayan adalah identik dengan kemiskinan. Hal itu yang dapat dilihat di banyak komunitas nelayan di Indonesia. Akan tetapi, kondisi yang demikian itu tidak terjadi pada nelayan Desa Bendar. Kehidupan nelayan di desa ini dapat dikatakan cukup makmur. Capaian nelayan Desa Bendar tersebut terlihat pada kesanggupan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan yang layak serta kondisi kesehatan yang realtif terjaga. Tidak seperti lazimnya kampung nelayan yang disesaki oleh rumah-rumah sangat sederhana dan lingkungan yang kumuh, Desa Nelayan Bendar nampak tertata dengan rapih disertai dengan rumah-rumah beton permanen, yang sebagiannya tergolong besar dan mewah.

Aktivitas perikanan tangkap yang dijalankan oleh Nelayan Desa Bendar saat ini sudah berjalan selama beberapa generasi terhitung sekurang-kurangnya sejak tahun 1950-an. Waktu itu aktivitas perikanan dijalankan dengan peralatan tradisional seadanya menggunakan bantuan perahu layar. Barulah pada akhir dekade tersebut terjadi perkembangan baru dalam teknologi perikanan yang ditandai dengan modifikasi bahan sintetis nilon untuk membuat jaring yang diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, kemudian terjadi satu lompatan perubahan lagi pada akhir tahun 1960-an dalam bentuk motorisasi kapal perikanan yang diawali dengan bantuan *crash program* dari Departemen Perhubungan. Peralihan perahu layar ke perahu bermotor telah memungkinkan nelayan memperluas wilayah menangkap sampai ke kawasan timur Pulau Jawa. Perluasan kawasan menangkap membawa implikasi nyata pada terjadinya peningkatan volume dan jenis ikan hasil tangkapan.

Sekitar pertengahan tahun 1970-an, nelayan Desa Bendar mulai bersentuhan dengan pengoperasian teknologi perikanan modern menggunakan pukot cicincin atau *purse seine*. Teknologi perikanan modern Jepang tersebut masuk secara berantai ke Indonesia setelah lebih dulu dioperasikan di beberapa kawasan perairan laut Asia Tenggara, yaitu Filipina, Thailand dan Selat Malaka. Hasil tangkapannya sungguh memuaskan, sehingga banyak nelayan tradisional Desa Bendar yang beralih secara beramai-ramai ke jenis alat tangkap tersebut setelah ada nelayan Desa Bendar yang berhasil mempelajari cara-cara pembuatan dan pengoperasiannya dari nelayan Pekalongan. Pengoperasian alat tangkap *purse seine* sekaligus menjadi awal bagi perkembangan usaha perikanan nelayan Desa Bendar dalam memasuki era perikanan komersial.

Teknologi perikanan tangkap terus berkembang. Ketika alat tangkap *purse seine* mulai dianggap kurang efisien, maka sebagian nelayan Desa Bendar cepat mengantisipasi keadaan dengan cara beralih kepada penggunaan alat tangkap baru yang kemudian populer dengan sebutan *cantrang*. Meskipun pada mulanya *cantrang* dimaksudkan untuk menangkap ikan-ikan kecil demersal sebagai umpan bagi alat tangkap pancing atau *holer*, akan tetapi fungsinya kemudian berubah menjadi alat tangkap andalan untuk menangkap ikan-ikan yang dapat dijual secara komersial. Malah kini jumlah nelayan yang mengoperasikan alat tangkap *cantrang* jauh lebih besar daripada jumlah nelayan yang mengoperasikan alat tangkap *purse seine*. Dengan kombinasi pengoperasian ketiga alat tangkap andalan tersebut: *purse seine*, *holer* dan *cantrang*, reputasi capaian nelayan Desa Bendar melejit meninggalkan nelayan-nelayan di daerah-daerah perikanan lain. Mereka kini dikenal sebagai nelayan sukses yang berhasil mendobrak stigma dan *status quo* nelayan sebagai kelompok komunitas miskin di Indonesia.

Keberhasilan nelayan Desa Bendar mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu merupakan buah dari hasil etos kerja produktif mereka dalam menjalankan usaha perikanan dengan tingkat kesebaran, keuletan,

daya inovasi, dan kesetiaan yang tinggi. Ternyata bukan itu saja. Keberhasilan yang mereka raih antara lain juga merupakan hasil dari dukungan finansial dari lembaga keuangan bank dan koperasi nelayan yang telah memfasilitasi usaha perikanan mereka dengan kredit pinjaman modal. Dari semua faktor tersebut, turut pula menentukan faktor kearifan lokal (*local wisdom*) yang mereka miliki dalam mengelola aktivitas perikanan tangkap secara cerdas melalui prinsip-prinsip kekeluargaan dan kebersamaan sebagai landasan kuat dalam sistem ekonomi kerakyatan yang kini menjadi dambaan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Secara tidak langsung, nelayan Desa Bendar telah mengajarkan pentingnya mengelola usaha perikanan berbasiskan sistem ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, sangat disayangkan usaha perikanan mereka kini mulai terancam bergerak lambat karena berbagai kendala. Di antaranya ialah tumpulnya peranan TPI sebagai pembeli yang menjamin seluruh hasil tangkapan nelayan terjual dengan harga yang pantas. Bakul yang menggantikan peranan TPI ternyata tidak pula melaksanakan kewajiban membayar semua nilai pembelian ikan dari nelayan dengan lancar. Akibatnya nelayan pemilik kapal selalu kewalahan dalam menyediakan uang tunai dalam jumlah besar untuk memastikan ABK memperoleh bayaran/haknya begitu penjualan ikan selesai, dan untuk memungkinkan kapal dapat segera beroperasi kembali pada trip berikutnya.

Terlepas dari kendala seputar mekanisme penjualan ikan, hambatan terberat yang berpotensi mengakibatkan usaha perikanan mereka mundur adalah kendala regulasi perikanan yang memberatkan serta arogansi aparat dalam menegakkan peraturan-peraturan perikanan dan kenelayanan yang cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan (*abuse of power*) yang bermotif ekonomi. Bagaimanapun, sebagai masyarakat nelayan yang berpendidikan rendah dan berwawasan terbatas, mereka tidak pernah berhenti mengetuk nurani aparat dari instansi pemerintah terkait di tingkat pusat maupun daerah agar terpanggil untuk memberikan perlindungan

hukum dan perlakuan adil yang menjamin hak-hak sosial/politik dan hak-hak ekonomi mereka, ditegakkan/dipenuhi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemakmuran nelayan di Desa Bendar. Pertama adalah teknologi penangkapan yang cukup modern, dengan armada penangkapan yang cukup besar, yaitu umumnya di atas 30 GT. Dengan alat tangkap yang seperti itu, nelayan Desa Bendar tidak lagi terkendala dengan musim dalam melaut. Selain itu mereka juga memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga mereka bisa menangkap ikan di manapun di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor lain yang cukup mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah ini adalah etos kerja yang tidak akan pulang ke rumah sebelum memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah yang besar. Dengan etos kerja yang demikian maka mereka mampu melakukan operasi penangkapan sampai dengan tiga bulan dalam satu kali melaut; suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh nelayan Indonesia pada umumnya. Adapun untuk peningkatan teknologi, faktor yang cukup dominan adalah kebiasaan mereka menabung, dan hanya menggunakan uang hasil melaut untuk mengembangkan usaha perikanan yang mereka geluti. Selain itu, sistem saham yang dikembangkan dalam perusahaan kapal juga sangat mendukung nelayan untuk bisa ikut memiliki kapal, yang sekaligus juga berarti meningkatkan pendapatan mereka.

Walaupun nelayan berhasil mengembangkan peralatan tangkapnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya, namun peran pemerintah sangat kecil terhadap keberhasilan itu. Memang ada nelayan yang meningkatkan armada penangkapannya dengan meminjam uang dari bank, namun pemberian pinjaman oleh bank itu bukan merupakan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Kebijakan pemerintah daerah sendiri belum banyak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan. Kebijakan pemberdayaan nelayan yang ada saat ini lebih banyak pada penyuluhan, yang oleh

masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Memang ada beberapa kebijakan berupa pemberian bantuan peralatan tangkap, namun jumlahnya tidak banyak, sehingga jauh dari kebutuhan masyarakat. Sementara bagi nelayan besar, kebijakan pemerintah juga dianggap kurang mendukung kepentingannya. Kebijakan perijinan untuk kapal di atas 30 GT yang terpusat misalnya, dianggap tidak mendukung kepentingannya, karena selain faktor jarak, pengurusannya juga membutuhkan waktu yang lama. Bagi masyarakat, untuk ijin pengoperasian kapal yang baru memang wajar jika perijinannya harus diproses di pusat. Akan tetapi, untuk perpanjangan ijin, karena provinsi itu merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan otonomi daerah, maka mereka mengusulkan agar prosesnya bisa dilakukan di provinsi. Dengan demikian ada efisiensi dalam pengurusan perijinan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga diharapkan bisa lebih cepat.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah:

- (a) Membuka akses nelayan terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian nelayan bisa mendapatkan modal untuk meningkatkan peralatan tangkapnya.
- (b) Nelayan perlu didorong agar penangkapan ikan tidak berkutat di kawasan pantai, melainkan berorientasi pada penangkapan lepas pantai. Untuk itu bantuan peralatan tangkap mestinya jangan berupa peralatan tangkap untuk di pantai, tetapi diarahkan pada peralatan tangkap lepas pantai.
- (c) Proses perijinan perlu disederhanakan. Untuk kapal di atas 30 GT, pada perijinan baru memang bisa dilakukan di Jakarta. Namun untuk perpanjangan ijin, sebaiknya bisa diproses di provinsi, karena provinsi pada dasarnya adalah perwakilan pusat di daerah. Dengan demikian waktu perijinan diharapkan bisa lebih cepat. Selain itu, perlu diatur mengenai pembatasan waktu proses perijinan, sehingga nelayan memiliki kepastian waktu.
- (d) Untuk meningkatkan etos kerja nelayan, nelayan kecil dari daerah lain bisa dipekerjakan magang pada nelayan Desa Bendar,

sehingga mereka menjadi terbiasa dengan pola kerja yang sampai beberapa bulan di tengah laut.

==== **DAFTAR PUSTAKA** ====

- Ancok, Djamaludin, 1995, Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Arief Budiman, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- csr-pesisir.blogspot.com/.
- Goulet, D, 1973, *The Cruel Choice: a New Concept in the Theory of Development*. New York, Atheneum.
- Hari Poerwanto, 2000, *Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Heru Nugroho, 1995, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Imron, Masyhuri, 2002, Struktur Kenelayanan dan Masalah Ekonomi Nelayan di Kapoposang, dalam Abdul Rachman Patji dan Riwanto Tirtosudarmo (ed) "*Beberapa Dimensi Kemasyarakatan dan Kebudayaan*". Jakarta, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- , 2003, Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, dalam "*Jurnal Masyarakat dan Budaya*" Vol. V No. 1/2003. Jakarta, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

- Isbandi Rukminto Adi, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kecamatan Juwana Dalam Angka 2008*, BPS Kabupaten Pati, Provinsi Jawa tengah.
- Kelautan dan Perikanan Pati Dalam Angka Tahun 2008*, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Kusnadi et. Al., 2006, *Enam Tahun Program PEMP. Sebuah Refleksi*. Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2008*. Pati, Pemerintah Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Loekman Soetrisno, 1995, Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Masyhuri, 1999, Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural, dalam Masyhuri (ed): *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap Sebuah Pendekatan*. Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- McCay, Bonnie J. and Jentoft, Svein, 1996, "From the Bottom Up: Participatory Issues in Fisheries Management", dalam *Society and Natural Resources*, 9: 237-250.

- McClelland, David C., 1971, *The Achievement Motive in Economic Growth*, dalam *Finkle and Gable (ed)*, hal 83-100.
- Moeljarto T., 1986, Alternatif Perencanaan Sosial Budaya, dalam *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000. Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Mubyarto, et. al., 1984, *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai*. Jakarta, Rajawali
- Najib, Mohamad, 1998, Organisasi Produksi dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan, dalam Masyhuri (ed), *Strategi Pengembangan Desa Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta, PEP-LIPI.
- Pati Dalam Angka 2009*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- Ratna Indrawasih (ed), 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Laut Secara Terpadu (Co-Management): Evaluasi Pengelolaan Model Co-Fish*. Jakarta, PMB-LIPI.
- Retno Winahyu dan Santiasih, 1993, Pengembangan Desa Pantai, dalam Mubyarto dkk., *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Selayang Pandang*, 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Sjahrir, 1986, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok, Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta, LP3ES.
- Todaro, Michael P., 1983, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- www.suarapembaruan.com/last/index.html



